

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN DALAM MENDISEMINASI NILAI-NILAI  
ISLAM DI KABUPATEN BANJARNEGARA**



**TESIS**

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Sosial

**MUKHAMMAD WAKHIDDIN**

NIM. 1617641008

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.iainpurwokerto.ac.id](http://www.pps.iainpurwokerto.ac.id) Email : [pps@iainpurwokerto.ac.id](mailto:pps@iainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 070/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Mukhammad Wakhidin  
NIM : 1617641008  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan  
Pembangunan dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam di  
Kabupaten Banjarnegara

Telah disidangkan pada tanggal **12 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Sosial (M.Sos.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 26 Februari 2021  
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001

**PENGESAHAN TESIS**

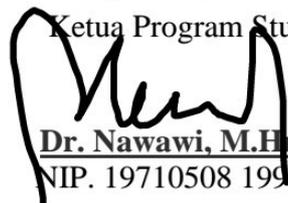
Nama : Mukhammad Wakhiddin  
NIM : 1617641008  
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul Tesis : Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan  
Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam di Kabupaten  
Banjarnegara

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 19741116 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		
3	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Pembimbing/ Penguji		
4	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		
5	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		

Purwokerto, 20 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dr. Nawawi, M.Hum**  
NIP. 19710508 199803 1 003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

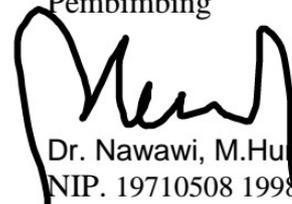
Nama : Mukhammad Wakhiddin  
NIM : 1617641008  
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul Tesis : Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan  
Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai  
Islam Di Kabupaten Banjarnegara

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 5 Januari 2021  
Pembimbing



Dr. Nawawi, M.Hum.  
NIP. 19710508 199803 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 7 Januari 2021

Hormat Saya,



**Mukhammad Wakhiddin**  
NIM. 1617641008

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN DALAM MENDISEMINASI NILAI-NILAI ISLAM DI  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Mukhammad Wakhiddin  
NIM. 1617641008

**ABSTRAK**

Di Kabupaten Banjarnegara peredaran minuman beralkohol dinilai cukup tinggi dan oleh sebagian masyarakat menganggap hal tersebut dikhawatirkan akan dapat memicu tindak kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamr atau Minuman Beralkohol, sanksi untuk pengedar masih dianggap ringan dan tidak membuat efek jera. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan dalam regulasi tersebut melalui sistem politik yang di dalamnya terdapat infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

PPP merupakan salah satu instrument dari infrastruktur politik, namun ia juga merupakan bagian dari suprastuktur politik dimana anggota partainya menjadi anggota dewan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan. Adanya peran ganda tersebut, PPP memerlukan strategi komunikasi politik dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama baik dengan infrastruktur maupun suprastruktur politik sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi politik PPP dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam dengan suprastuktur dan infrastruktur politik di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilaksanakan di DPC PPP Kabupaten Banjarnegara dengan *key informan* anggota Dewan Fraksi PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis kualitatif. Adapun analisisnya adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik PPP dengan suprastruktur politik diantaranya PPP mengkategorikan khalayak suprastruktur politik sebagai kelompok politik. Dalam menyusun pesan persuasif, PPP menggunakan konsep AIDDA. Selain itu dalam menerapkan metode penyampaian pesan, PPP menggunakan kombinasi antara metode *informatif*, *edukatif*, dan *cursive*. Sedangkan untuk penggunaan media, PPP dalam mengaplikasikan komunikasi politiknya tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi interpersonal atau komunikasi *face to face*.

Sedangkan untuk strategi komunikasi politik PPP dengan infrastruktur politik, PPP mengkategorikan khalayak infrastruktur politik sebagai kelompok sosial. Dalam menyusun pesan persuasifnya, PPP juga menggunakan konsep AIDDA yang kemudian menerapkan metode penyampaian pesannya dengan menggunakan kombinasi antara metode *Redudancy*, *Informatif*, *Persuasif*, *Edukatif*, dan *Cuersive*. Untuk penggunaan media komunikasi politik, PPP menerapkan hal yang sama seperti kepada suprastruktur politik yaitu tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi interpersonal.

**Kata Kunci:** strategi komunikasi politik, partai politik, PPP

# **THE POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY OF PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN IN DISSEMINATING ISLAMIC VALUES IN BANJARNEGARA DISTRICT**

Mukhammad Wakhiddin  
NIM. 1617641008

## **ABSTRACT**

In Banjarnegara Regency, the circulation of alcoholic drinks is considered quite high and some people think that it is feared that it will lead to crime. Whereas in the Banjarnegara Regional Regulation Number 8 of 2008 concerning Supervision and Control of Alcoholic Drinks or Drinks, the sanctions for dealers are still considered light and do not create a deterrent effect. For that, it is necessary to change the regulation through a political system in which there is a political infrastructure and a political superstructure.

PPP is one of the instruments of political infrastructure, but it is also part of the political suprastructure where members of the party are members of the board who have the authority to decide policies. With this dual role, PPP requires a political communication strategy in an effort to realize common interests both with infrastructure and the political superstructure as a form of actualization of Islamic values.

This study aims to determine and analyze the PPP political communication strategy in an effort to disseminate Islamic values with the political suprastructure and infrastructure in Banjarnegara Regency. This research was conducted at DPC PPP Banjarnegara Regency with key informants of members of the PPP Faction Council. The research method used is descriptive qualitative. The analysis is an interactive analysis model.

The results of this study indicate that the PPP political communication strategy with the political superstructure, including PPP, categorizes the political superstructure audience as a political group. In composing a persuasive message, PPP uses the AIDDA concept. In addition, in implementing the message delivery method, PPP uses a combination of informative, educative, and cursive methods. As for the use of media, PPP in applying its political communication does not use communication media but rather applies face to face communication.

As for the PPP political communication strategy with political infrastructure, PPP categorizes the political infrastructure audience as social groups. In compiling its persuasive message, PPP also uses the AIDDA concept which then applies the method of delivering its message by using a combination of Redundancy, Informative, Persuasive, Educative, and Cuersive methods. For the use of political communication media, PPP applies the same thing as to the political superstructure, namely not using communication media. but more often apply face to face communication.

Keywords: political communication strategy, political parties, PPP

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

**(QS. Ar Ra’d: 11)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa tulus dan ikhlas tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu saya, Sarinah. Ibu yang selalu berdo'a untuk hal yang terbaik bagi anak-anaknya baik di dunia maupun di akhirat.
2. Ayah saya, Marno. Ayah adalah inspirasi dan pahlawan keluarga. Karena bermula dari kerja keras, perjuangandan cita-cita yang mulia jua telah mengantarkan saya hingga bisa melangkah jauh sampai akhirnya tesis ini dapat selesai.
3. Istri saya, Rina Sangadah. Berkat dukungan baik materil maupun moril, tesis ini dapat selesai seperti saat ini. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, yang selalu mengingatkan saya untuk memberikan contoh yang terbaik bagi anaku Hayfa Syakira Sakhi al Zahsy dan saudaranya kelak dalam menuntut ilmu.
4. Mertua saya, bapak Priyantomo dan ibu Katinah yang telah memberi dukungan, kebaikan, dan do'a kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
5. Adik saya, Iis Naeni Putri Wahyuni yang saling support dalam hal belajar.
6. Mas Aziz dan Mba Andri, kakak ipar saya selalu mensupport setiap usaha penyelesaian tesis ini
7. Kedua orang tua angkat saya, bapak Heny Ruslanto (Alm) dan ibu Heny Ruslanto, terimakasih atas bimbingan, arahan dan ilmunya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam Di Kabupaten Banjarnegara” dapat selesai dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita termasuk golongan umat Beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat nanti.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan motivasi, baik dari segi moril maupun materi. Oleh karena itu, izinkanlah penulis sampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Nawawi, M.Hum., Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam S2 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing tesis yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis untuk memberikan hasil yang terbaik. Sikap dan kepedulian beliau menjadi pemicu semangat dan mengembangkan potensi yang dimiliki penulis, sehingga dengan dukungan dan motivasi yang tulus, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Musta'in, M.Si., selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan proposal tesis yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen dan Karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh studi, sehingga dapat digunakan sebagai bekal dalam penyusunan tesis ini.
6. Jajaran pengurus dan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Kabupaten Banjarnegara yang telah meluangkan waktu untuk menjawab sekian banyak pertanyaan wawancara penulis di tengah berbagai kegiatannya, sehingga penulis dapat melengkapi hasil penelitian secara seimbang.

7. Istri tercinta Rina Sangadah dan anakku Hayfa Syakira Sakhi al Zahsy yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas KPI angkatan 2016 terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dan kerjasamanya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa beliau dan kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik dan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 7 Januari 2021

Penulis

Mukhammad Wakhiddin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II Strategi Komunikasi Politik PPP Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam Di Kabupaten Banjarnegara</b>	
A. Landasan Teori	
1. Strategi.....	14

2. Komunikasi Politik .....	16
3. Strategi Komunikasi Politik .....	24
4. Nilai-Nilai Islam.....	28
5. Partai politik Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai islam ..	30
6. Kerangka Berfikir Penelitian.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
4. Data dan Sumber Data .....	39
5. Teknik Pengumpulan Data .....	39
6. Teknik Analisis Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PPP .....	44
1. Letak geografis .....	44
2. Sejarah berdirinya .....	45
3. Lambang, visi dan misi.....	51
4. Struktur organisasi .....	56
5. Program kerja.....	58

B. Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan  
 Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam dengan Suprastruktur  
 dan Infrastruktur politik Di Kabupaten Banjarnegara

1. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan Suprastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara .....	62
a. Memahami Khalayak .....	62
b. Menyusun Pesan Persuasif .....	69
c. Metode .....	74
d. Memilah dan memilih Media .....	77
2. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan Infrastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara .....	81
a. Memahami Khalayak .....	81
b. Menyusun Pesan Persuasif .....	88
c. Metode .....	95
d. Memilah dan Memilih Media .....	103

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	109
B. Saran .....	110
C. Kata Penutup.....	110

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mayoritas bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Umat Islam merupakan manusia yang meyakini Islam sebagai agama dan kepercayaan. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen. Islam juga agama yang universal, keuniversalan ini dibuktikan dalam pokok ajarannya yang dapat dimplementasikan dalam sebuah aspek kehidupan manusia. Konsekuensi ini menjadi tugas setiap muslim untuk menyampaikan ajaran nilai-nilai Islam disetiap waktu, tempat dan bidang kegiatan manusia.

Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, bukan saja karena tuntunannya yang serba mencakup seluruh segmen kehidupan manusia, tetapi juga memiliki aturan yang berfungsi mengontrol dan mengawasi bahkan memberi penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam mengamalkan ajaran agamanya dengan saksama dan konsisten demi mencapai kualitas hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Kehadirannya memberikan arti dan sebagai penutup ketauhidan bagi agama sebelumnya untuk mengenali siapa Sang Khaliq sesungguhnya. Berkembangnya Islam sebagai ajaran *rahmatan lil 'alamin* menjadi konsekuensi untuk selalu berhadapan dengan zaman yang terus berubah. Karenanya, umat Islam selalu ditantang bagaimana mensintesakan keabadian wahyu dengan kesementaraan zaman.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia Islam semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana contoh kasus anti umat Islam Rohingnya oleh kaum Budha yang di promotori oleh biksu Wirathu yang di kenal dengan “Gerakan 969”, perang antara Israel dan palestina dan kebijakan dilarang memakai hijab di beberapa` kawasan Negara barat. Di Indonesia sendiri, dalam dua tahun terakhir aksi teror bom bunuh diri juga terjadi secara masif yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil. Adanya serangan bom bunuh diri tersebut mengakibatkan munculnya Islam phobia bagi umat diluar muslim

bahkan bagi muslim itu sendiri. Maka dari itu permasalahan umat Islam tidak akan selesai hanya dengan cara berdakwah secara tradisional yang masih kuat melekat pada masyarakat secara umum. Tentunya ini merupakan wacana serius dalam salah satu kajian aktifitas dakwah sebagai wujud mendiseminasi nilai-nilai Islam dalam bentuk *hablum minAllah dan hablum minannaas*.

Disisi lain, pada kenyataannya nilai-nilai ke-Islam-an tidak mungkin berkembang tanpa adanya dakwah, karena dalam kehidupan Rasulullah sarat dengan kegiatan dakwah. Demikian pula yang dikembangkan oleh para sahabat dan penerus beliau. Sebagaimana hal ini sudah ditegaskan oleh Allah sendiri melalui kitab suci-Nya, Al- Qur'an. Salah satunya adalah seperti tertuang dalam surat Ali Imran ayat 104.<sup>1</sup>

Dakwah merupakan suatu keharusan dalam rangka mengemban agama dan mengembangkan nilai – nilai Islam, aktivitas dakwah yang maju akan membawa pengaruh terhadap kemajuan agama. Sebaliknya aktivitas dakwah yang lesu akan berakibat pada kemunduran agama. Maka dapat dimengerti jika Islam meletakkan kewajiban dakwah pada setiap pemeluknya. Kemajuan dan kemunduran ummat Islam sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya.

Aktivitas dakwah sendiri merupakan sebagai suatu proses usaha kerjasama untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya menyangkut segi-segi atau bidang yang sangat luas. Ia memasuki seegenap lapangan kehidupan manusia seperti pendidikan, social, ekonomi, budaya, dan tidak terkecuali di bidang politik.

Politik hendaknya dijadikan sebagai sarana yang efektif dalam usaha aktualisasi nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan politik itu sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Jalaludin Rakhmat dalam Islam aktual menggambarkan tentang perjuangan dakwah yang juga harus digerakkan dengan kekuatan politik.<sup>2</sup> Hal inilah yang bisa dikatakan jarang disentuh oleh para

---

<sup>1</sup> “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

<sup>2</sup> Hal yang senada juga diungkapkan Abdul basit, bahwa dakwah tidak akan berkembang manakala tidak memanfaatkan politik. Demikian juga politik tidaka akan menjadi

individu atau aktivis dakwah sebagaimana permasalahan yang sedikit diungkapkan sebelumnya.

Tindakan umat Islam dalam gerakan politik adalah sebuah keharusan karena perubahan tidak terletak pada teks al-Quran, namun terletak pada tindakan kita. Kekuatan politik merupakan kekuatan yang efektif sebagai upaya menegakkan kebenaran, maka seyogyanya keterlibatan anggota politik, partai politik maupun simpatisan yang membawa nama agama khususnya agama Islam adalah usaha melakukan dakwah dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan di masyarakat. Walaupun realitasnya kini kerap berbalik, karena banyak orang maupun organisasi partai politik yang mengatasnamakan agama terbawa dalam putaran politik kekuasaan menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang kemurnian perjuangan mereka. Selain itu, sebagai seorang maupun lembaga politik yang membawa nama agama yang suci, seakan ternoda oleh permainan politik itu sendiri yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan materialistis dengan melakukan berbagai cara termasuk jika harus menggunakan dalil-dalil agama. Jika benar itu terjadi pada partai politik yang membawa nama agama Islam tentu akan membahayakan masyarakat, karena dalam bahasa Munir Mulkan bisa dikatakan telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.

Tahun 2018 dan 2019 merupakan moment tahun politik dinamakan PEMILU diadakan secara serentak. Tahun 2018 sebanyak 171 daerah mengadakan PILKADA pada 27 Juni 2018. Sedangkan pada 2019 masyarakat akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Adanya momentum tersebut, setiap partai politik baik elite politik maupun kadernya melakukan pertemuan dengan sesama partai politik dan masyarakat. Pertemuan disini tidak lepas dari terciptanya komunikasi politik. Komunikasi politik memungkinkan elite politik menyediakan ruang publik untuk berkomunikasi dan saling menjajaki peluang-peluang yang memungkinkan mereka bertemu dan membicarakan masalah-masalah penting yang sedang

dihadapi serta memungkinkan mereka bersepakat melakukan hal-hal yang strategis di waktu kini maupun yang akan datang.

Setiap momentum komunikasi politik dapat dibaca konteksnya, karena dengan memahami konteksnya orang akan lebih memahami makna teks yang ada dalam konteks komunikasi politik itu.<sup>3</sup> Sebagaimana contoh fenomena pertemuan elite partai politik antara Jokowi dan Prabowo dengan salah satu agendanya menunggang kuda di Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan tersebut membahas persoalan kebangsaan, namun disisi lain dapat juga diartikan sebagai salah satu upaya menstabilkan tensi politik pasca PILPRES 2014. Dalam ranah kajian komunikasi politik, hal tersebut lazim disebut ZOPA (*Zone of Possible Agreement*), yaitu membuka area komunikasi yang lebih fleksibel untuk memperoleh kesepakatan yang bisa menjadi landasan kesepakatan bersama di masa mendatang.<sup>4</sup>

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Terminologi partai politik dalam ruang keilmuan sangat banyak dan beragam. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik- (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 175.

<sup>4</sup> Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 38.

<sup>5</sup> UU NOMOR 2 TAHUN 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 404.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas,<sup>7</sup> dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Salah satu partai politik yang berasaskan agama adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam.<sup>8</sup> Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat (4) partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah.<sup>9</sup>

Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.<sup>10</sup>

Pada pemilu tahun 2014 yang diikuti oleh 12 partai politik termasuk PPP yang juga ikut andil didalamnya, PPP mendapatkan kursi di DPR RI sebanyak 39 kursi dari 560 kursi yang ada. Perolehan tersebut bertambah 2 kursi dari hasil pemilu 2009. Dengan demikian, sejak berdirinya PPP, masyarakat Indonesia menerima kehadirannya sebagai partai yang dipercaya untuk membawa Indonesia kearah yang lebih baik lagi.

---

<sup>7</sup> Ideologi partai politik sangat beragam, diantaranya ideologi nasionalis, sosialis, komunis, demokrat, pancasila, dll. Begitu juga dengan asas maupun basisnya, diantaranya yaitu bersas dan berbasis agama, etnis kedaerahan, profesi, programatik, dan lain sebagainya. Feith dan Castle mengelompokkan aliran politik di Indonesia selama rentang 1945-1965 ke dalam lima arus utama, yaitu: 1) Nasionalisme Radikal; 2) Tradisionisme Jawa; 3) Islam; 4) Sosialisme demokratik; dan 5) Komunis. Ridho Al- Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktek di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 9.

<sup>8</sup> Anggaran Dasar PPP pasal 2. Dengan berasaskan Islam maka PPP masuk dalam kategori partai politik Islam dimana ia harus memperjuangkan nilai-nilai Islam. Lengkapnya lihat Ridho Al- Hamdi, *Partai Politik Islam ...* hal. 9.

<sup>9</sup> Muqadimmah Anggaran Dasar PPP

<sup>10</sup> Anggaran Dasar PPP pasal 5

Pada PEMILU PILEG (Pilihan Legislatif) tahun 2009 dan tahun 2014, khususnya di Kabupaten Banjarnegara PPP menunjukkan kekuatan kesolidannya dengan mendapatkan kursi dengan jumlah yang sama di DPRD, yaitu sebanyak 6 kursi dari 45 kursi. Partai politik lain seperti PKB mendapat 5 kursi, PKS 5 kursi, PAN 6 kursi, PDI P 6 kursi, GERINDRA 5 kursi, DEMOKRAT 3 kursi, GOLKAR 6 kursi, dan NASDEM 3 kursi.<sup>11</sup>Sedangkan dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) pada tahun 2017, parpol PPP yang berkoalisi dengan parpol Demokrat dan parpol GOLKAR berhasil mengusung dan menghantarkan Budhi Sarwono sebagai Bupati Banjarnegara dan Syamsudin sebagai wakilnya. Hal ini juga membuktikan bahwa komunikasi politik PPP dengan partai lain dan masyarakat dalam hal memilih kepala daerah mencapai tujuannya.

Dalam perhelatan PEMILU tahun 2019, Kabupaten Banjarnegara menambah kursi DPRD yang semula 45 menjadi 50 kursi. Meskipun ada penambahan jumlah kursi, Perolehan kursi PPP mengalami penurunan 1 kursi. Adapun perolehan dari semua partai sebagai berikut, : PDI-P 9 kursi, PKB 7 kursi, PKS 5 kursi, NASDEM 4 kursi, PAN 4 kursi, GERINDRA 3 kursi, DEMOKRAT 7 kursi, HANURA 2 kursi, PPP 5 kursi, dan GOLKAR 4 kursi.

Terlepas dari hasil perolehan PEMILU, gerakan DPC PPP Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam juga dilakukan secara berkesinambungan di beberapa wilayah, salah satunya adalah pengajian rutin di desa Kambangwangi kecamatan Wanadadi yang dilakukan setiap bulan sekali. Adapun pengisi acara dalam pengajian tersebut adalah pengurus DPC PPP Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara sendiri mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.000.025 jiwa. Sebanyak 993.254 jiwa menganut agama Islam.<sup>12</sup>Kabupaten yang dijuluki kota “Es Dawet Ayu”ini juga memiliki 5 organisasi masyarakat Islam yang selalu aktif dalam menjalankan roda organisasinya, diantaranya Syarikat

---

<sup>11</sup> Data diolah dari laman <http://kpu-banjarnegarakab.go.id> diakses 4 Mei 2018 pukul 10.59 WIB

<sup>12</sup><https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1272/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2015.html> diakses 7 Mei 2018 pukul 12.34 WIB

Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tafsir AlQur'an (MTA), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).<sup>13</sup> Meskipun demikian, pada kenyataannya, maraknya kasus peredaran minuman keras di Kabupaten Banjarnegara membuat sebagian masyarakat khawatir menjadi salah satu pemicu tindak kejahatan. Pada bulan April 2018, Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah memusnahkan sebanyak 2.292 botol minuman keras (miras) dari satu kasus.<sup>14</sup> Di tahun yang sama pada bulan Mei, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara juga memusnahkan minuman keras hasil operasi sepanjang tahun 2017 hingga 2018 sebanyak 1.465 botol dan 232 botol cium kemasan.<sup>15</sup>

Minuman Keras/ beralkohol sudah dipastikan dilarang oleh agama Islam. Maka menjahui minuman ini guna menyelamatkan kehidupan generasi muda dan bangsa adalah suatu keniscayaan. Di Kabupaten Banjarnegara sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamr atau Minuman Beralkohol. Namun sanksi atas pengedar masih dianggap ringan dan tidak membuat efek jera yakni hanya mendapatkan kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling tinggi lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000,00).<sup>16</sup> Hal ini tentunya diperlukan kajian ulang atas perda tersebut melalui para legislatif yang diusung oleh partai politik, terutama partai politik yang membawa nama agama Islam untuk lebih memperjuangkan demi tegaknya nilai-nilai Islam. Sedangkan organisasi masyarakat Islam yang ada secara *De Jure* memiliki kekuatan dalam menentukan arah regulasi, namun tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan.

PPP sebagai salah satu partai politik Islam yang mempunyai *legitimate power* memiliki fungsi juga sebagai bagian dari Infrastruktur politik. Namun

---

<sup>13</sup>Sumber kankemenag Kabupaten Banjarnegara.

<sup>14</sup>[http://www.seputarbanjar.com/2018/04/11/kejari-banjarnegara-musnahkan-2-292-botol-miras/diakses 31 Mei 2018 pukul 14.24 WIB](http://www.seputarbanjar.com/2018/04/11/kejari-banjarnegara-musnahkan-2-292-botol-miras/diakses%2031%20Mei%202018%20pukul%2014.24%20WIB)

<sup>15</sup>[https://satelitpost.com/beritautama/satpol-pp-banjarnegara-musnahkan-1-465-botol-miras diakses 31 Mei 2018 pukul 14.46 WIB](https://satelitpost.com/beritautama/satpol-pp-banjarnegara-musnahkan-1-465-botol-miras/diakses%2031%20Mei%202018%20pukul%2014.46%20WIB)

<sup>16</sup>Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol Pasal 9 ayat 1

sebagai partai politik, dia juga memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan publik, karena anggota partai yang menjadi anggota dewan juga masuk menjadi suprastruktur politik dalam sistem politik. Dengan demikian PPP memiliki peran ganda yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Adanya peran ganda tersebut, tentunya membutuhkan strategi komunikasi politik dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama baik dengan infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kepentingan bersama ini juga tentunya tidak lepas guna merubah dari keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi sekaligus sebagai upaya dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam.

Adanya fenomena tersebut dan perolehan suara partai secara lokal (kabupaten) ini menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih PPP sebagai studi kasus penelitian tentang strategi komunikasi politik partai politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa disaat suara Partai yang tidak membawa nama agama cenderung naik dan partai yang membawa nama agama secara umum menurun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa stabil dengan mempertahankan perolehan legislatifnya seperti pada pemilu 2009 dan 2014.<sup>17</sup> Berangkat dari fenomena diatas maka bagaimana strategi komunikasi partai politik yang membawa nama agama khususnya PPP dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas peneliti akan mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, : Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam dengan Suprastuktur dan Infrastruktur Politik Di Kabupaten Banjarnegara ?

---

<sup>17</sup> Salah satu gagalnya partai politik Islam dalam memperjuangkan kepentingannya di negara yang menganut sistem demokrasi adalah minimnya perolehan kursi di parlemen. Manakala secara mayoritas kursi di parlemen diperoleh oleh partai politik Islam maka akan semakin memudahkan kepentingannya untuk segera terealisasi. Lengkapnya lihat dalam Warjio, *Gagalnya Partai Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 314.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam dengan Suprastuktur dan Infrastruktur Politik Di Kabupaten Banjarnegara.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, khususnya pada kajian komunikasi politik yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam.
- b. Menjadi sumber inspirasi dan rujukan tentang strategi komunikasi politik partai politik Islam dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di masyarakat.

#### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi bagi siapa saja yang fokus dan peduli terhadap arah pengembangan dakwah, terutama melalui sarana politik.
- b. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi para pengurus dan kader partai politik Islam secara umum dan khususnya Partai Persatuan Pembangunan serta masyarakat luas dalam menyiarkan nilai-nilai Islam.

### **E. Telaah Pustaka**

Kajian tentang komunikasi politik dan partai politik tidak dapat dipisahkan. Partai politik sebagai bagian dari sistem politik mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan komunikasi politik sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti kemenangan dalam setiap pemilu maupun untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingannya. Guna mempertajam kajian tentang strategi komunikasi politik partai dalam pemilihan umum kiranya perlu mengemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tema tersebut di atas.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Katimin, Syukur Kholil dan Muhammad Husni Ritonga tentang Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) dalam Pemberdayaan Komunitas Muslim di Sumatera Utara.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwa: Pertama, bentuk komunikasi internal yang menggunakan komunikasi bawah (*downward communication*) komunikasi ke bawah adalah komunikasi satu arah yang merupakan perintah untuk melakukan berbagai program dari DPP yang diturunkan ke DPW untuk diimplementasikan. Sedangkan bentuk komunikasi eksternal adalah program pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan adalah Rumah Pintar, Rumah Sehat, *House of Concern*, *Home Alert* dan Respon Bencana, Rumah Keluarga Indonesia, Rumah Aspirasi, Rumah Konsultasi Syariah, dan ruang kuliah. Program-program ini adalah bentuk komunikasi politik PKS dalam pemberdayaan komunitas Muslim di Sumatera Utara. Kedua, media komunikasi politik PKS dalam memberdayakan komunitas Muslim menggunakan media cetak dan elektronik yang bersifat kooperatif. Terutama, PKS Sumut belum memiliki media massa sendiri seperti surat kabar, majalah, televisi dan radio. Terkait hal itu, PKS juga menggunakan fasilitas WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Ketiga, kendala internal yang dihadapi adalah komitmen para kader untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan motto “menghormati masyarakat”, sementara hambatan eksternal adalah munculnya partai politik baru dengan berbagai identitas, masih maraknya kegiatan politik uang membuat orang belum matang dalam politik. Keempat, PKS telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya komunitas Muslim bahwa PK Sejahtera adalah benar-benar orang yang berorientasi pada masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat.

Maya ElektriKA Puspitasari tentang Analisis Strategi Komunikasi Politik Melalui Media Baru (Studi Kualitatif Komunikasi Politik Faisal Basri dan Bien Benjamin, Calon Independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Melalui

---

<sup>18</sup> Katimin, et.al., "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Komunitas Muslim di Sumatera Utara," Online Jurnal of *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7, No.05 ( Mei, 2018), 19-27 (diakses 18 Juli 2018).

Media Sosial).<sup>19</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faisal-Biem telah menyampaikan pesan secara berulang di media sosial dengan metode informatif dan edukatif, namun kurang persuasif. Secara garis besar, strategi komunikasi politik yang dilakukan cukup optimal terutama dalam membangun citra politik sebagai pemain baru di kancah perpolitikan. Elemen-elemen penting dalam pembentukan citra sudah saling terintegrasi dan dibangun secara bersamaan dalam strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem. Citra independen dan bersih yang dikomunikasikan melalui media sosial telah diwujudkan dengan sistem penggalangan donasi *online*. Pemeliharaan citra tersebut dilakukan dengan penciptaan hubungan, meski tergolong statis. Tidak hanya independensinya, dominasi media sosial pada strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem juga telah menambah warna baru bagi demokrasi dan juga menjadi pembelajaran politik terutama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012. Meski peran media konvensional belum tergantikan, namun keberadaan media sosial dapat menjadi senjata pelengkap dalam berkomunikasi dan membentuk citra politik. Penelitian ini hanya fokus kepada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akhirul Aminullohtentang Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 (Studi tentang Penyikapan Partai PKS terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD) di Yogyakarta.<sup>20</sup> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD tidak mempengaruhi sikap PKS dalam kebijakan partai. Kebijakan PKS berkaitan dengan strategi komunikasi politik tidak berbeda baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-undang

---

<sup>19</sup>Maya Elekrika Puspitasari, "Analisis Strategi Komunikasi Politik Melalui Media Baru (Studi Kualitatif Komunikasi Politik Faisal Basri dan Biem Benjamin, Calon Independen Gubernur & Wakil Gubernur Dki Jakarta, Melalui Media Sosial)", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), vii.

<sup>20</sup>Akhirul Aminulloh, "Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 (Studi tentang Penyikapan Partai PKS terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD)" *Tesis*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), xiv.

pemilu ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan strategi komunikasi politik yang bercorak dakwah. Strategi pemenangan pemilu PKS selanjutnya di rencanakan dalam bentuk empat tahapan aksi; *pertama*, PKS mendengar; *kedua*, PKS mengajak; *ketiga*, PKS bicara; dan *keempat*, PKS menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun pemenangan pemilu menjelang pemilu 2009. Dalam menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pemilu tersebut, PKS menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Peran strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada pemilu legislatif 2009 terkesan kurang berdampak signifikan pada perolehan suara partai. Suara PKS hanya naik sedikit, yaitu sebanyak tujuh kursi di DPRD Propinsi Yogyakarta, naik satu kursi dibanding pemilu 2004 yang hanya enam kursi.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti strategi komunikasi politik PPP dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam dengan suprastuktur dan infrastruktur politik di kabupaten Banjarnegara.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan tesis sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan.

Bab *Pertama*, sebagai pembuka sekaligus sebagai pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari komunikasi, komunikasi politik, unsur-unsur komunikasi politik, strategi komunikasi, dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu Penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

Bab *ketiga*, adalah bab yang akan menyajikan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini meliputi Paradigma dan pendekatan Penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab *keempat* yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Deskripsi Profil DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara (Sejarah, asas, sifat dan Prinsip Perjuangan; Tujuan dan usaha; dan susunan

pengurus). Selanjutnya yaitu Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam Di Kabupaten Banjarnegara dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Bab *kelima* sebagai penutup dari keseluruhan tesis ini, yang meliputi Simpulan, implikasi dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Landasan Teori

##### 1. Strategi

Kata strategi sendiri adalah turunan dari bahasa Yunani klasik, “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata “*strategos*” yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (*The Art Of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.<sup>1</sup>

Dalam konteks negara, strategi adalah pekerjaan khusus instrumen kekuasaan (politik / diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi) untuk mencapai tujuan politik negara dalam kerja sama atau dalam persaingan dengan aktor.<sup>2</sup>

Seorang pensiunan jendral dalam bukunya *On War*, Karl Von Clausewitz, ia merumuskan strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Begitu juga dengan Marthin-Anderson, menurutnya strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.

Strategi adalah istilah yang mengacu pada jaringan pemikiran, gagasan, wawasan, pengalaman kompleks, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi, dan harapan dalam memberikan panduan umum untuk tindakan-tindakan spesifik dalam menggapai tujuan akhir.<sup>3</sup> Strategi juga dapat diartikan suatu cara atau teknik dalam membuat rencana tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau keinginan yang telah dirumuskan bersama. Atau dengan kata lain, supaya bisa berjalan dan menghasilkan ssesuai dengan target yang direncanakan.

Dengan demikian, Strategi disini didefinisikan sebagai upaya pendekatan-pendekatan alternatif yang ditempuh guna memposisikan organisasi bersangkutan

---

<sup>1</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 61

<sup>2</sup> Harry R. Yarger, *Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book On Big Strategy* (United States: Strategy Studies Institut, 2006), hal. 5

<sup>3</sup>Fred Nickols, *Strategy: Definitions & Meaning*, 2016 hal. 6, [https://www.nickols.us/strategy\\_definitions.pdf](https://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf)

dalam mencapai keberhasilan yang berkesinambungan atau starategi bisa disebutkan sebagai alternatif yang dipilih berdasarkan perkiraan optimalitas dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Menurut Karl Von Clausewitz perbedaan antara taktik dan strategi sebagai berikut: taktik adalah seni menggunakan “kekuatan senjata” dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Rencana jangka panjang tersebut adalah strategi. Dalam strategi ini tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Jadi startegi adalah perencanaan untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses dan gagalnya strategi.<sup>4</sup>

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu identik dengan sebuah “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus yang tercermin pada terkondisikannya ruang lingkup sebagaimana awal tujuan sebuah perencanaan dibuat. Namun Von Clausewitz juga menjelaskan bahwa tujuan strategi bukanlah merupakan kemenangan yang nampak dipermukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya.

Hingga awal industrialisasi pengertian strategi hampir hanya terbatas pada makna militer. Kini sedikit demi sedikit pengertian strategi makin diperluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja pengertian ini juga diperluas ke bidang ekonomi, politik, bahkan ranah ilmu komunikasi.

Strategi dalam pendekatan ilmu komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi. Suatu strategi juga merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan rumusan tujuan yang jelas, juga memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak.<sup>5</sup>

Perumusan strategi merupakan pilihan atas strategi yang akan digunakan dari sekian banyak alternatif strategi. Strategi yang dipilih tentu saja diharapkan strategi efektif yang akan membawa organisasi pada pencapaian objektifnya pada masa depan.

---

<sup>4</sup>Toni Andrianus, dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal. 196-197.

<sup>5</sup> Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: PT Amrico, 1984), hal. 59.

Setelah melakukan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam lingkungan organisasi dan dijalankan oleh unit-unit fungsional didalam organisasi tersebut. Pada tingkat unit fungsional seperti pada bagian organisasi, alokasi sumber daya biasanya berjalan melalui teknik penyusunan anggaran dan perencanaan proyek serta dalam mekanisme kontrol. Sedangkan untuk struktur organisasi, tentunya disesuaikan dengan besar dan bidang kegiatan organisasi tersebut sehingga bisa diputuskan apakah akan menggunakan struktur sederhana, struktur fungsional, struktur decisional dan seterusnya.<sup>6</sup>

## 2. Komunikasi Politik

Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu "komunikasi" dan "politik". Hubungan kedua istilah itu dinilai bersifat intim dan istimewa karena pada domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih luas mengenai perilaku politik.

Secara etimologis, komunikasi mempunyai arti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Istilah komunikasi diambil dari bahasa Inggris "*communication*". Istilah ini berasal dari bahasa Latin *communicatio* yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah *communication* bersumber pada kata "*communis*" yang berarti sama, dalam arti sama makna atau pengertian bersama, dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan melaksanakan apa yang diinginkan komunikator.<sup>7</sup>

Pada tahun 1948, Harold D. Lasswell dengan mencoba membuat definisi komunikasi yang lebih sempurna dengan menanyakan "siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya".<sup>8</sup> Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses, berisi tentang penyampaian atau pertukaran ide, gagasan, atau informasi, dari

---

<sup>6</sup> Yosol Iriantara, *Manajemen Strategis Public Relation* (Jakarta : Ghalia, 2004) hal. 90.

<sup>7</sup> H.A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 8.

<sup>8</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal 14.

seseorang kepada orang lain, dan menggunakan simbol yang dipahami maknanya oleh komunikator dan komunikan.<sup>9</sup>

Joseph A. DeVito menjelaskan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (*noise*), terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik.<sup>10</sup>

Dalam mengkaji komunikasi sebagai proses, Onong U. Effendy dalam perspektif mekanistik, membaginya menjadi dua tahap yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder.<sup>11</sup> Proses komunikasi secara primer di mana proses penyampaian pikiran dan atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer berupa bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder, di mana proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Ada dua faktor seorang komunikator menggunakan alat atau sarana, diantaranya adalah jauhnya jarak komunikan dan banyaknya jumlah komunikan.

Di sisi lain, Onong U. Effendy juga menempatkan gaya atau model komunikasi dalam proses komunikasi menjadi dua, diantaranya proses komunikasi secara linear dan proses komunikasi secara sirkular.<sup>12</sup> Proses komunikasi secara linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linear ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka maupun dalam situasi komunikasi bermedia.<sup>13</sup> Sedangkan sirkular sendiri sebagai terjemahan dari kata *circular* yang secara harfiah berarti bulat, bundar atau keliling. Dalam konteks komunikasi adalah terjadinya *feedback* atau umpan balik dalam proses

---

<sup>9</sup> Haris Sumadiria, *Sosiologi Komunikasi Massa* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hal. 6.

<sup>10</sup> Joseph A. DeVito, *Komunikasi Antar Manusia* (Jakarta: Professional Books, 1997), hal. 23.

<sup>11</sup> Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 32-38.

<sup>12</sup> *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi ...*, hal. 38-41.

<sup>13</sup> Istilah ini sebetulnya sama dengan model atau gaya komunikasi satu arah yang biasanya di gunakan dalam komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok.

komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Umpan balik disini adalah sebuah tanggapan atau respon dari komunikan terhadap pesan yang ia terima dari komunikator.<sup>14</sup>

Menurut Wilbur Schramm, yang dikutip oleh Haris, bahwa kita tidak mungkin bisa berkomunikasi secara efektif apabila kita tidak memperhatikan dua hal, *pertama*, kerangka pengetahuan (*frame of reference*) yakni paduan pengalaman dan pengertian. *Kedua*, bidang pengalaman. Tanpa ada kesamaan bidang pengetahuan dan bidang pengalaman antara komunikator dan komunikan, komunikasi akan menimbulkan terjadinya kesalahan pengertian (*misunderstanding*), kesalahan persepsi (*misperception*), kesalahan penafsiran (*misinterpretation*), atau bahkan kesalahan dan kegagalan komunikasi (*miscommunication*).<sup>15</sup>

Komunikasi manusia dapat dibagi ke dalam kategori-kategori, dimana pembagian secara umum yang diungkapkan oleh Littlejohn adalah sesuai dengan *level* yakni komunikasi interpersonal, kelompok, organisasional dan massa.<sup>16</sup> Komunikasi interpersonal berkaitan dengan komunikasi antara orang, biasanya berhadapan muka, dan dalam situasi privat. Komunikasi kelompok kerap berhubungan dengan interaksi manusia dalam kelompok-kelompok kecil biasanya dalam situasi pembuatan keputusan. Komunikasi kelompok ini melibatkan interaksi interpersonal dan kebanyakan dari teori-teori komunikasi interpersonal diterapkan juga pada *level* kelompok. Komunikasi organisasional muncul dalam jaringan-jaringan kooperatif besar dan memasukkanseluruh aspek, sebenarnya dari komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi massa berkaitan dengan komunikasi publik. Biasanya menengahibanyak aspek-aspek komunikasi interpersonal, kelompok dan organisasional masuk ke dalam proses komunikasi massa.

---

<sup>14</sup> Istilah ini sama dengan model atau gaya komunikasi dua arah. Dalam teori komunikasi, terdapat macam-macam umpan balik (*feedback*), diantaranya yaitu umpan balik positif (*positive feedback*), umpan balik negatif (*negative feedback*), umpan balik netral (*netral feedback*), dan umpan balik yang bersifat nihil (*zero feedback*). Selain itu, sifat umpan balik juga ada yang langsung atau seketika (*direct feedback*) dan ada yang tertunda (*delayed feedback*). Selengkapnya lihat dalam Haris Sumadiria, *Sosiologi Komunikasi Massa ...*, hal. 13-18.

<sup>15</sup> *Sosiologi Komunikasi Massa...*, hal. 7.

<sup>16</sup> Stephen W Littlejohn and Karen A. Foss, *Theories of Human Communication* (New Mexico: Wadsworth, Thomson Learning, 2005), hal 14-15.

Sedangkan pengertian politik sendiri, merujuk dalam kamus internasional, politik berasal dari kata *politiek* atau *politics* yang mempunyai arti seni memerintah.<sup>17</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata politik bermakna sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap neegara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga digunakan sbagai nama bagi sebuah disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.<sup>18</sup>

Politik adalah kegiatan manusia yang berkenaan dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan. Politik mengandung makna kegiatan atau proses, sebaliknya “system politik” secara tidak langsung, menunjukkan eksistensi tatanan atau pola-pola hubungan. Dalam lingkungan praktis, politik disebut sebagai “seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin”, “seni memerintah”, dan studi tentang “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.<sup>19</sup>

Politik biasanya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan diantara para individu dan kelompok atas alokasi ganjaran atau “nila-nilai” di dalam masyarakat. Politik juga mencakup proses pengendalian social, termasuk lingkungan dan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Berbagai wajah politik dengan gampang terlihat pada setiap kelompok social seperti pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, pengalokasian nilai, cakupan tujuan, pengendalian social, persaingan kpntingan, dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan pengaruh. Tatapi secara umum, politik lebih mengacu pada kebijakan-kebijakan umum dan alokasi daripada proses intern organisasi-organisasi swasta.

Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf yunani kuno abad ke 5 SM. Filsuf seperti plato dan aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang baik. Menurutny, di dalam politik semcam itu manusia akan hidupbahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalm suasana moralitas tinggi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Osman Raliby, *Kamus Internasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982) hal. 416.

<sup>18</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 694.

<sup>19</sup>Jack C Plano, dkk, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994) hal.181.

<sup>20</sup>Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), hal 14.

Menurut Peter Merkl yang dikutip oleh Miriam membagi politik menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>21</sup>

1. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*).
2. Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perbuatan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*).

Abdul Muin Salim menerangkan bahwa politik berasal dari kata *politic* (inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata tersebut bermakna *acting or judging wisely, well judge, prudent*. Yang diambil dari bahasa latin *politicus* dan bahasa Yunani (*greek*) *politicos* yang bermakna *relating to citizen*. Selain itu kata politik juga berasal dari kata *polis* yang bermakna city atau kota.<sup>22</sup>

Ghaffar Aziz menyatakan bahwa politik adalah sebagai implementasi agama. Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari pemerintah sebuah Negara adalah terrealisasinya kepentingan publik dan terlindunginya rakyat dari berbagai ancaman yang membahayakan.<sup>23</sup>

Merujuk dari definisi komunikasi dan politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka hadirnya komunikasi dan politik merupakan suatu disiplin ilmu yang saling berkaitan sejak terjadi perang dunia ke dua. Beberapa tokoh juga mendefinisikan komunikasi politik. McNair menyatakan bahwa "*Political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenue), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state reward or punishes)*" (Komunikasi politik merupakan "Diskusi publik mengenai penjatahan sumber daya publik – yakni mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik, kewenangan resmi – yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan melaksanakan

---

<sup>21</sup>Dasar-Dasar Ilmu Politik ..., hal 15-16.

<sup>22</sup>Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alqur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 34.

<sup>23</sup> A. Ghaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hal. 12.

peraturan-peraturan; dan sanksi-sanksi resmi – yakni apa yang negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman”).<sup>24</sup>

Pengertian senada yang lebih sederhana juga diungkapkan oleh Susanto yang dikutip Uud Wahyudin, ia mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan dengan pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama.<sup>25</sup>

Pengertian ini lebih mengedepankan interaksi antara negara (*the state*) dengan rakyat atau publik. Interaksi ini dalam berbagai realitas politik dapat dicermati melalui pertanyaan-pertanyaan realistik, misalnya, apa yang diperoleh rakyat, bagaimana keputusan-keputusan penyelenggara negara dibuat – adil atukah tidak, dan sejauh mana rakyat mau menerima penjabatan yang ada.<sup>26</sup>

Selain McNair, Meadow juga memberikan penegasan tentang istilah komunikasi politik. Menurutnya komunikasi politik adalah segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang samapi tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik. Sistem politik adalah sistem-sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain terkait dengan kekuasaan dan kewenangan penjabatan sumber daya untuk maksud pengambilan keputusan-keputusan.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi *input* sistem politik. Pada waktu yang bersamaan pula, komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau *output* dari sistem politik. Dengan demikian melalui komunikasi politik maka rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik.

Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi politik ini terbagi dua, yaitu unsur suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari; lembaga

<sup>24</sup>Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi ..., hal 30.

<sup>25</sup>Uud Wahyudin, “Komunikasi Politik dan Budaya Diplomasi” dalam *Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktek Komunikasi Kontemporer*, ed. Atwar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal.413-414.

<sup>26</sup>Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hal. 5.

<sup>27</sup>Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan ..., hal. 2-3.

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari; partai politik, interest group, media massa, tokoh masyarakat, dan lainnya. Menurut VJ. Bell ada tiga jenis pembicaraan dalam pengertian politik yang mempunyai kepentingan politik yang jelas sekali politis, yaitu; pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman atau janji), pembicaraan pengaruh (tanpa sanksi), dan pembicaraan otoritas berupa perintah.<sup>28</sup>

Cangara menjelaskan bahwa komunikasi politik diantaranya berfungsi untuk:<sup>29</sup>

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.
- b) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik.
- c) Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris dan para pendukung partai.
- d) Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
- e) Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara.
- f) Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis dan para komentator atau pengamat politik.
- g) Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional.
- h) Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.
- i) Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik.
- j) Menjadi *Watchdog* atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas.

---

<sup>28</sup>*Theories of Human Communication...*, hal. 34.

<sup>29</sup>*Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi ...*, hal 33-34.

Komunikasi politik harus dilakukan dengan intensif dan persuasif agar komunikasi dapat berhasil dan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi politik yaitu; status komunikator, kredibilitas komunikator, dan daya pikat komunikator. Carl Hoveland, seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses komunikasi selalu berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam bentuk lisan oleh komunikator kepada komunikan guna mengubah perilaku orang lain.<sup>30</sup> Pendapat Hoveland ini menyangkut efek dari suatu proses komunikasi persuasif. Asumsi dasar dari Hoveland adalah bahwa sikap seseorang maupun perubahannya tergantung pada proses komunikasi yang berlangsung apakah komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima dengan baik.

Menurut Asep Saiful Muhtadi, ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik.<sup>31</sup> *Pertama*, komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga ataupun berupa kumpulan orang.

*Kedua*, khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan feedback dalam suatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.

*Ketiga*, saluran-saluran komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi. Misalnya, dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, ia berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari

---

<sup>30</sup>Dan Nimmo, *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 125.

<sup>31</sup>Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 30. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Uud, Lihat lengkapnya dalam Uud Wahyudin, "Komunikasi Politik dan Budaya Diplomasi" ..., hal. 422-423.

pemerintah; dan di sisi lain, ia juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat.

Berbeda dengan Nimmo, ia berpendapat ada unsur lain yang harus ada dalam komunikasi politik. Unsur-unsur tersebut terdiri atas 5 unsur, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.<sup>32</sup> Perbedaan diantaranya terletak pada adanya pesan dan pengaruh atau efek komunikasi politik. Pesan politik disini merupakan pernyataan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari atau tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Selanjutnya adalah Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) baik dalam pemilihan umum ataupun sebuah keputusan.

### 3. Strategi Komunikasi Politik

Strategi pada hakikatnya adalah bagian dari perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>33</sup> Demikian pula strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

Hafied Cangara mencoba mengumpulkan definisi strategi komunikasi dari beberapa pakar, diantaranya<sup>34</sup> :

- a) Rogers, dia menjelaskan bahwa strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.
- b) Middleton, strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran

---

<sup>32</sup>*Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi ...*, hal. 31.

<sup>33</sup>*Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik ...*, hal. 300.

<sup>34</sup>*Perencanaan dan Strategi Komunikasi ...*, hal. 61.

(media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Merujuk dari definisi diatas, maka menurut hemat penulis startegi komunikasi adalah suatu rancangan komunikasi yang ditujukan untuk merubah cara pandang dan tingkah laku manusia melalui transfer ide atau gagasan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil tujuan yang optimal, efektif dan efisien.

Strategi komunikasi perlu disusun secara luwes, sehingga taktik operasional komunikasi dapat segera disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Guna mencapai tujuan komunikasi secara efektif, komunikator perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan dengan harapan dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan teknik komunikasi yang akan ditetapkan.<sup>35</sup>

Selain itu dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat. Manakala sudah dipetakan faktor pendukung dan penghambat maka akan sangat mempermudah mengambil sebuah alternatif tindakan agar pesan tersampaikan kepada komunikan dengan pemaknaan yang sama. Kegagalan berkomunikasi seringkali menimbulkan kesalahpahaman, kerugian, dan bahkan malapetaka. Risiko tersebut tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat lembaga, komunitas, dan bahkan negara.<sup>36</sup>

Strategi komunikasi politik sendiri mengandung implikasi bahwa adanya alternatif tindakan yang dilaksanakan secara sitematik untuk mengembangkan rencana komunikasi politik tertentu agar terjadi optimalisasi dalam rangka memperoleh tujuan politik.

Strategi komunikasi politik yang harus dijalankan oleh komunikator politik, yaitu diantaranya adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang *homofilis*. Istilah *homofili* ini berasal dari perkataan Yunani *Homois*, yang mempunyai arti sama atau serupa. Secara etimologis homofili berarti afiliasi atau komunikasi dengan pribadi yang sama, atau yang memiliki atribut tertentu yang sama atau serupa.<sup>37</sup>Suasana *homofilis* yang

---

<sup>35</sup>Onong U. Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal 33.

<sup>36</sup>Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya* (Bandung : Rosdakarya, 2005), hal. 1.

<sup>37</sup>Ardial,*Komunikasi Politik* (Jakarta: Indeks, 2010), hal. 151.

harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi) dan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan media politik.

Berbeda dengan *Heterofili* yang merupakan cermin kebalikan dari *homofili*. *Heterofili* adalah adanya perbedaan derajat dari orang yang berkomunikasi dengan sifat-sifat tertentu. Heterofili juga diasumsikan sebagai tingkat ketika pasangan individu yang berkomunikasi berbeda atribut tertentu, seperti pendidikan, status sosial, dan konteks sosial.

Berkaitan dengan langkah-langkah strategi komunikasi politik, Ardial menjabarkan sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) Memahami Khalayak

Komponen psikologis yang harus dikenal pada diri khalayak yang berkaitan dengan politik adalah keyakinan, kepentingan, dan motivasi khalayak, baik yang bersifat politik maupun non politik. Selain itu, kebutuhan dan motivasi individu-individu yang akan menjadi khalayak politik juga harus dikenali, diketahui, dan dipahami yang terdiri atas pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, kemampuan khalayak untuk menerima pesan-pesan media yang digunakan, dan pengetahuan khalayak terutama perbendaharaan kata yang digunakan.

b) Menyusun Pesan Persuasif

Agar pesan politik dapat bersifat persuasif, maka perlu diperhatikan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Syarat utama agar pesan tersebut dapat mempengaruhi adalah pesan harus mampu membangkitkan perhatian. Perhatian ini dapat didapatkan dengan sendirinya melalui keinginan khalayak untuk menyaksikan politikus (sebagai publik figur) yang akan menyajikan pesan-pesan politik tersebut. Selain itu, pesan politik akan menarik perhatian selama ia (politikus) memberikan harapan atau hasil yang kuat relevansinya dengan persoalan kebutuhan yaitu kebutuhan pribadi dan kelompok.

c) Menetapkan Metode

Langkah selanjutnya yaitu memilih metode penyampaian dan metode menyusun isi pesan politik yang sesuai. Terdapat beberapa metode

---

<sup>38</sup>Komunikasi Politik..., hal. 85-94

komunikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, yaitu:

- *Redundancy*, dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi dengan jalan mengulang-ulang pesan politik kepada khalayak. Manfaatnya adalah khalayak akan lebih memperhatikan pesan dan tidak mudah melupakan pesan-pesan itu karena disampaikan secara berulang.
- *Canalizing*, yaitu komunikator politik menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif-motif yang ada pada khalayak. Proses *canalizing* adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk keberhasilannya, komunikasi politik haruslah dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan masyarakat.
- *Informative*, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara memberi penerangan yang artinya menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, pendapat yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penerangan memiliki fungsi untuk memberikan informasi tentang fakta semata maupun kontroversial, atau memberikan informasi untuk menuntun khalayak ke arah pendapat tertentu.
- *Persuasive*, yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan kesempatan untuk berfikir kritis, bahkan jika perlu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Melalui metode ini, kesan politik itu akan selalu berisi selain fakta dan pendapat juga dapat non-fakta dan bentuk pernyataannya dapat berubah propaganda, agitasi dan sebagainya.
- *Educative*, dikenal juga sebagai salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. Metode ini dapat disebut juga metode mendidik yang memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak.

- *Cursive*, metode ini mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Pesan dari komunikator politik berisi ancaman dan dimanifestasikan dalam bentuk peraturan, perintah, dan intimidasi yang pelaksanaannya didukung oleh kekuatan cukup tangguh.

d) Memilah dan memilih media

Diperlukan adanya pemilahan dan pemilihan media komunikasi politik secara cermat agar sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, yaitu dengan memperhatikan sistem komunikasi politik di suatu wilayah atau negara.

Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan taktiknya yang mampu membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat. Perencanaan strategi komunikasi politik sangatlah penting, tidak hanya untuk mengetahui ke mana arah dari kegiatan komunikasi politik namun juga memenangkan dukungan masyarakat secara politik.

#### 4. Nilai-nilai Islam

Secara etimologis, kata “nilai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan banyak makna. Dua di antaranya ialah “sifat-sifat (hal-hal) yang berguna bagi kemanusiaan” dan “sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakekatnya.”<sup>39</sup> Dari makna leksikal tersebut, nilai Islam dapat diartikan sebagai sesuatu yang berguna dan bersifat menyempurnakan kehidupan manusia sesuai dengan hakekatnya, yang berasal dari ajaran-ajaran agama Islam.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa nilai-nilai Islam sendiri tidak akan berkembang tanpa adanya dakwah. Dengan demikian setiap tindakan seseorang maupun lembaga harus disertai ghirah perjuangan dakwah demi menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam sendiri dibagi menjadi dua yaitu nilai bersifat universal dan nilai bersifat domestik. Nilai bersifat universal adalah nilai yang dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan umat manusia di dunia yang diantaranya adalah kedisiplinan, kejujuran, kerja keras,

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 783.

kebersihan, dan kompetisi.<sup>40</sup> Selain itu, M. Syafi'i Anwar menjelaskan bahwa Kuntowijoyo juga menjabarkan nilai-nilai Islam secara universal berupa musyawarah, silaturahmi, kerjasama, keadilan dan perubahan.<sup>41</sup> Sedangkan nilai yang bersifat domestic adalah nilai yang hanya dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan umat muslim saja yang diantaranya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan amar ma'ruf nahi munkar.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam adalah segala sesuatu yang berguna dan berfungsi menyempurnakan kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Al Qur'an dan sunah nabi. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai-nilai Islam yang digambarkan oleh Kuntowijoyo yang bersifat universal yaitu, Musyawarah, silaturahmi, kerjasama, keadilan dan perubahan.

Musyawarah adalah suatu usaha bersama dengan sikap rendah hati guna memecahkan persoalan (mencari Penyelesaian/ jalan keluar) untuk dapat mengambil suatu keputusan bersama dalam penyelesaian atau juga pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian.

Musyawarah memiliki tujuan yakni untuk mencapai mufakat atau juga persetujuan bersama. Pada dasarnya prinsip musyawarah ini merupakan bagian dari demokrasi. Maka musyawarah sampai saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik. Sedangkan dalam dunia politik sendiri, musyawarah mempunyai tujuan yang diantaranya adalah Memperoleh kesepakatan dari seluruh pihak anggota musyawarah sehingga pada keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah tersebut bisa diterima dan juga dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu juga, masalah harus dapat Menyelesaikan suatu masalah yang sulit serta memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang hingga keputusan yang diperoleh sesuai dengan standar anggota musyawarah atau sesuai dengan persepsi anggota musyawarah. Dengan begitu pengambilan keputusan melalui musyawarah tersebut akan lebih berbobot karena di musyawarah tersebut terdapat pemikiran, pendapat serta juga ilmu dari para anggotanya.

Kedua, silaturahmi. Pengertian dari silaturahmi sendiri adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, sanak, atau saudara yang masih memiliki hubungan rahim atau hubungan

---

<sup>40</sup> Abul Basit, *Filsafat Dakwah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 203-207.

<sup>41</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. Xiv.

darah dengan kita. Namun, pengertian silaturahmi kini sudah berbeda, kini silaturahmi diartikan sebagai melakukan perbuatan baik kepada kerabat atau siapapun, baik dalam sikap, tutur, atau hal lain. Hal ini bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah.

Ketiga adalah kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Keadilan juga merupakan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi seseorang. Kuntowijoyo mencoba membaginya dalam 3 substansi masyarakat yang demokratis. (1). Hak politik (Demokrasi politik, mengenai hubungan negara dengan masyarakat), (2). Hak sipil (Demokrasi sosial-ekonomi, mengenai hubungan elite dengan masyarakat banyak), (3). Hak aktualisasi diri (Demokrasi budaya dan agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara).

Sedangkan yang terakhir adalah perubahan. Sejarah sudah mengajarkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam satu malam. Setiap perubahan haruslah terencana dan bertahap. Adapun tujuan adanya perubahan adalah menuju dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kuntowijoyo mengungkapkan ada tiga kemungkinan cara perubahan: yaitu *change now*, perubahan sebagai proses bertahap dan sistematis, dan perubahan sebagai proses perlahan-lahan.

##### 5. Partai politik Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam

Sebagaimana yang diamanatkan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, tugas dari partai politik diantaranya adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan opini publik lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Jimly Ass Hiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006), hal. 115-116.

Partai politik Islam yang dimaksud adalah partai yang berideologi Islam dan/atau partai yang berideologi terbuka, tetapi pada kenyataannya menggunakan simbol dan basis massa Islam sebagai identitas partai. Di dalam negara modern, menurut Meriam Budiardjo partai politik mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu:<sup>43</sup>

- a) Sebagai sarana komunikasi politik; Partai Politik berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang berbekas seperti suara dipadang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*intereste aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (*intereste articulation*).
- b) Sebagai sarana sosialisasi politik, didalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik didalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui metode ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus-kursus penataran, dan sebagainya
- c) Sebagai sarana rekrutment politik Dalam hal ini Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Selain itu juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selction of leadership*).

Sebagai sarana pengatur konflik didalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, Partai politik berusaha untuk mengatasinya. Sementara itu Ramlan Surbakti berpendapat

---

<sup>43</sup>Dasar-Dasar Ilmu Politik....., hal. 163.

bahwa fungsi utama Partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.<sup>44</sup>

Perjuangan politik dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam sudah muncul sejak terbentuknya organisasi Syarekat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Syarikat Islam (1912). Tujuan awal pembentukan Sarikat Islam adalah untuk melindungi para usahawan muslim dalam menggerakkan roda perekonomian yang pada saat itu akan dimonopoli oleh Belanda. Seiring dengan perkembangan kondisi kebutuhan akan kelembagaan negara untuk memilih anggota parlemen dan konstituante, maka perkumpulan Syarikat Islam pun ikut andil dalam pencatutan politik tersebut dengan nama Partai Sarekat Islam Indonesia.

Pada awal masa orde lama (1945-1966) dibawah pimpinan Presiden Soekarno, Pemilihan umum 1955 adalah pemilihan umum yang berhasil diselenggarakan untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Dari segi pelaksanaannya, pemilu 1955 sering dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah politik indonesia. Pemilu 1955 diikuti oleh 172 partai politik yang secara ideologis mewakili pembelahan sosial politik masyarakat pada waktu itu. Feith menyebut pemilu 1955 sebagai pemilu yang pesertanya kental menggunakan agama dan ideologi sebagai basis sekaligus alat perjuangan partai politik. Eksistensi partai Islampada pemilu 1955 yang secara akumulatif mengumpulkan dukungan sebanyak 43,73 % suara dapat disebut sebagai sejarah gemilang kejayaan partai-partai Islam.<sup>45</sup>

Hasil perolehan pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi tidak terlalu mengembirakan bagi partai-partai Islam, karena justru sebagian besar partai Islam berada pada posisi papan tengah dan bawah.<sup>46</sup> Begitu juga pada pemilu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 bahwa partai politik Islam mengalami perkembangan yang cukup dinamis baik dari segi jumlah partai yang muncul dan tenggelam mengikuti regulasi yang berlaku, perolehan suara, maupun masalah yang dihadapi dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam.

---

<sup>44</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1992), hal. 116.

<sup>45</sup> Moch. Nurhasim, "Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis" dalam *Masa Depan Partai Islam Di Indonesia*, ed. Moch. Nurhasim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal.2-3.

<sup>46</sup> Partai papan atas adalah partai yang memperoleh suara diatas 13 persen; sedangkan partai papan tengah apabila perolehan kursinya antara 7-12 persen; dan disebut partai papan bawah apabila perolehan suaranya di bawah 75 persen atau tidak lolos parliamentary threshold. *Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis...*, hal.7.

Sebagaimana bentuk partai politik pada umumnya, partai politik Islam juga mempunyai program kerja yang lebih universal dan bukan hanya untuk kaum muslim saja. Program yang ditawarkan meliputi;

a) Kenegaraan

Mengenai bentuk negara selalu menjadi polemik antara partai Islam dan pemerintah, namun kiranya partai Islam sekarang lebih moderat sehingga Partai Keadilan berpendapat bahwa bentuk negara ini berdasarkan pada inti bukan pada bentuk namun yang penting adalah solidaritas negara yang terkait dengan pembinaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri maupun yang lintas daerah serta daerah tersebut diberi otonomi dan kebebasan dalam mengurus daerahnya sendiri.

b) Gender.

Mengenai peran politik perempuan menurut partai Islam tidak ada masalah karena perempuan dan laki-laki harus disamakan dalam segala-galanya. Karena fungsi sosial kemasyarakatan perempuan juga mempengaruhi jalannya negara. Kalau fungsi-fungsinya semua disamakan nanti tidak berjalan alamiah. Negara yang menentukan kebijakan terhadap perempuan, sebatas mana mereka dapat berkiprah dalam peran sosial kemasyarakatannya, dan sebatas nama mereka perlu menjaga peran fitrahnya untuk membina anak-anak bangsa. Kalau tidak bisa terjadi disorientasi kehidupan.

c) Sosial, ekonomi dan politik

Dalam menangani masalah sosial masyarakat, partai Islam menginginkan agar kehidupan sosial masyarakat lebih harmonis, selain itu kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan. Mengatasi kemiskinan, problem kekurangan gizi, mengatasi pengangguran dan memperhatikan nasib buruh. Agar kehidupan sosial politik dan ekonomi stabil maka pemerintah harus lebih respon pada gejala yang tidak baik, sehingga apa saja yang menjadi problem pemerintah dapat diatasi.

Beberapa program yang ditawarkan oleh partai Islam ini lebih berorientasi pada kemaslahatan umum, tidak nampak sama sekali adanya

keinginan untuk mendirikan Islam sebagai dasar negara maupun tujuan untuk mendirikan negara Islam.

Untuk merealisasikan program dan tujuan partai tentunya melalui perjuangan yang harus dilakukan, perjuangan ini bisa lewat jalur parlementer maupun ekstra parlementer.

a) Parlementer

Perjuangan lewat jalur parlemen merupakan sebuah perjuangan untuk yang memungkinkan seorang wakil partai untuk dapat mempertahankan apa yang menjadi program partai sebelumnya, sehingga program partai yang merupakan representasi masyarakat bawah dapat terpenuhi.

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan partai-partai Islam maka politik dapat membawa kepada keadilan, kerukunan, kesejahteraan bersama. Akan tetapi ini menuntut kerja sama antar partai Islam, kalau bisa penyatuan partai-partai ini kedalam aliansi, dan akhirnya fusi. Hal ini dilakukan karena partai politik Islam menyadari bahwa kalau didalam parlemen perwakilan dari partai yang duduk dalam masing-masing fraksi kurang mendapat suara sehingga perlu adanya koalisis politik dengan partai yang lain.

Dengan demikian walaupun partai Islam mempunyai dasar Islam sebagai dasar perjuangannya dan mempunyai cita-cita menegakkan ajaran Islam dalam masyarakat dan negara, hal ini bukan berarti ada pertentangan dengan partai yang berdasar dan berideologi lain seperti demokrasi, sosialisme ataupun Pancasila.

Bentuk kongkrit perjuangan Fraksi Islam didalam parlemen, perjuangan dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam banyak dilakukan oleh wakil umat Islam di parlemen, seperti: pembentukan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya

b) Ekstra parlementer

Gerakan perjuangan lewat jalur ekstra parlementer ini lebih terbuka dan merupakan penekanan terhadap kebijakan pemerintah,

perjuangan ini bisa lewat demonstrasi, tulisan yang dapat mempengaruhi publik maupun aksi solidaritas dan sebagainya.

Gerakan Demonstrasi ini dilakukan untuk menekan pemerintah selaku pelaksana pemerintahan, ini bisa terjadi apabila pemerintah dalam menentukan kebijakan bertentangan atau menyalahi aturan hukum dan perundang-undangan sehingga dengan kebijakan tersebut rakyat merasa dirugikan, atau juga karena pemerintah terlalu lamban dalam menangani sebuah kasus besar.

Bentuk perjuangan dengan pengerahan massa sebenarnya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan anarkhi, namun bila dikelola dengan manajemen aksi yang lebih profesional dan memahami etika dalam mengeluarkan pendapat maka anarkhi akan dapat diminimalisir. Selain itu tuntutan dengan menggunakan dialog lebih sangat bermanfaat dan tidak menimbulkan banyak korban.

## **B. Kerangka Berpikir Penelitian**

Dinamika komunikasi politik yang menjadi tema pokok penelitian ini selanjutnya dipetakan dalam Model Transaksi Simultan dari Melvin L DeFleur.<sup>47</sup> Dengan karakternya yang nonlinear, model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi. *Pertama*, faktor lingkungan fisik (*physical surroundings*), yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what* dan *how* pesan-pesan komunikasi dipertukarkan. *Kedua*, faktor situasi sosio-kultural (*sociocultural situations*), yakni bahwa komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. *Ketiga*, faktor hubungan sosial (*social relationships*), yakni bahwa status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

Karena itu, sebagai bagian dari kegiatan komunikasi, komunikasi politik juga sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Bagaimana pesan-pesan politik itu dapat ditransmisikan dan diterima melalui saluran situasional pada tempat dan saat komunikasi itu dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan sistem, faktor-faktor yang berpengaruh

---

<sup>47</sup>Melvin L DeFleur et.al., *Fundamentals of Human Communication* (California: Mayfield Publishing Company, 1993), hal. 21-25.

itu juga dapat dipetakan dalam kesatuan sistem dengan masing-masing fungsi yang diperankannya. Hubungan-hubungan sosial yang kurang kondusif bagi berlangsungnya komunikasi, baik karena latar belakang sosio-kultural maupun karena lingkungan fisik yang membentuk sistem itu aktif, dapat dicairkan dengan melibatkan dan menghidupkan fungsi-fungsi antar faktor yang saling berhubungan. Jadi, faktor-faktor lingkungan fisik, situasi sosio-kultural, dan hubungan sosial antar pelaku komunikasi, sebenarnya juga dapat digunakan dalam menganalisis tingkah laku komunikasi politik.

Selanjutnya, untuk keperluan telaah dalam kajian ini, digunakan teori birokrasi dari Max Weber. Asumsi-asumsi dalam teori birokrasi ini mempengaruhi gambaran komunikasi dalam organisasi. Max Weber mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara terbaik bagi organisasi dalam mengatur kerumitan kerja individu dengan tujuan yang umum, dan prinsip-prinsipnya memiliki kekuatan yang tetap.

Menurut Max Weber, bahwa “Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu.”<sup>48</sup> Hal ini dapat dilaksanakan dengan tiga aspek dalam birokrasi yaitu, otoritas, spesialisasi, dan regulasi. Bagi Weber, ada tiga faktor atau karakteristik yang harus dimiliki organisasi untuk mewujudkan birokrasi rasional yaitu: Otoritas, spesialisasi, dan regulasi/aturan.<sup>49</sup> Otoritas hadir bersamaan dengan kekuasaan. Keefektifan organisasi bergantung pada tingkatan yang memberikan manajemen kekuasaan secara resmi (*legitimate power*). Sedangkan spesialisasi adalah sejumlah individu dibagi menurut pembagian pekerjaan, dan mereka mengetahui pekerjaan mereka masing-masing dalam organisasi. Terakhir aspek birokrasi adalah aturan. Implementasi regulasi yang mengatur perilaku setiap orang memungkinkan dilakukannya koordinasi organisasi. Aturan-aturan ini harus rasional dan dirancang secara bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

PPP merupakan sebuah lembaga birokrasi politik maka peneliti akan mencari tahu terlebih dahulu tentang kebijakan, perencanaan dan strategi komunikasi politik PPP dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam dengan infrastruktur dan suprastruktur politik di Kabupaten Banjarnegara. Hal itu dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :

---

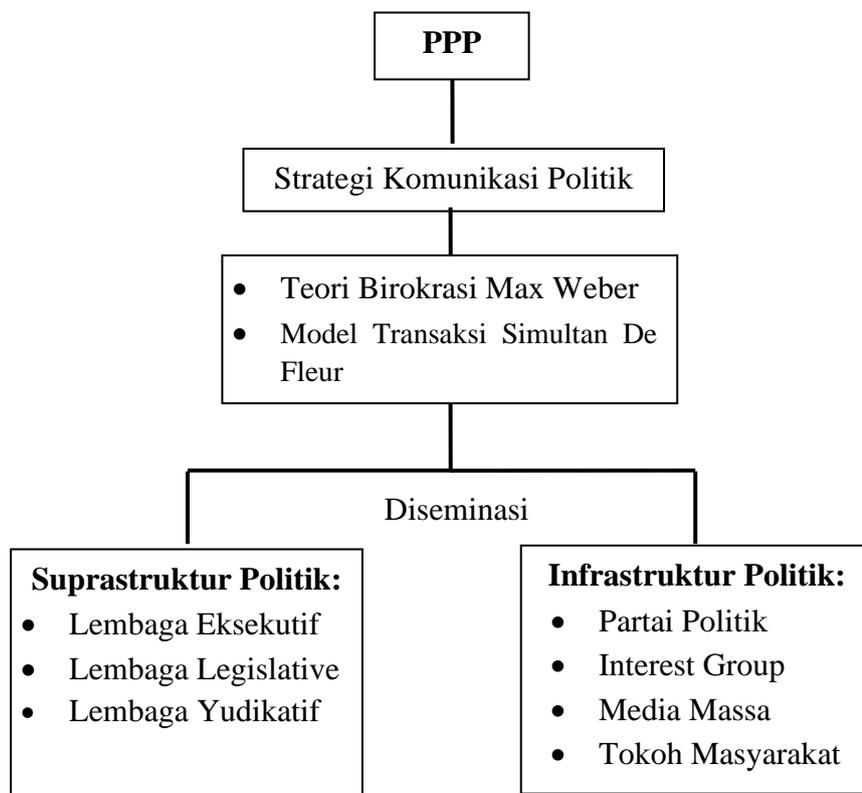
<sup>48</sup>Stephen W. Littlejohn, *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. (Edisi terjemahan oleh Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika, 2009), Hal 362. Lihat juga dalam Morissan, *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 391.

<sup>49</sup>*Teori Komunikasi: Theories of Human Communication ...*, Hal 363-364. Lihat juga dalam Morissan, *Teori Komunikasi...*, hal. 393-398.



Gambar 1 Penjabaran perencanaan komunikasi dari kebijakan sampai operasional

Setelah mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik, peneliti menggunakan Model Transaksi Simultan Defleur dan Teori Birokrasi Max Weber untuk mempermudah mengetahui sejauh mana keberhasilan operasional komunikasi politik. Hal itu dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2 Skema Alur Penelitian (modifikasi penulis)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini tidak akan dicari hukum umum atas sebuah kebenaran atau generalisasi. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus.

Studi kasus sendiri, menurut Creswell, memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam suatu kasus (*single case*) atau banyak kasus (*multiple cases*). Metode ini memungkinkan untuk memperoleh data dari berbagai macam sumber, dokumentasi, catatan arsip, interview, observasi, dan artefak secara fisik. Sementara dalam membuat analisis dilakukan dengan cara deskriptif (*description*), tematis (*themes*), dan berupa pernyataan (*assertions*).<sup>1</sup>

##### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPC PPP Kabupaten Banjarnegara di Jalan Selamanik-Wangon No 24 Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dan wilayah kerja DPC PPP Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 7 Desember 2020.

##### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal, atau orang, tempat data untuk variabel penelitian yang melekat dan yang dipermasalahkan.<sup>2</sup> Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Selain itu, subjek penelitian juga harus ditata sebelum peneliti mengumpulkan data. Penentuan subjek digunakan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Peneliti menentukan informan kunci (*key informan*) terlebih dahulu untuk mengawali pengumpulan data, yaitu ketua DPC PPP Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, peneliti menentukan informan lain berdasarkan rekomendasi dari informan kunci tersebut yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Adapun informan tersebut adalah pengurus DPC PPP Kabupaten Banjarnegara dan anggota dewan legislatif fraksi PPP yang terlibat

---

<sup>1</sup> Jhon W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*, 2nd Edition; (California: Sage Publications, 2007), hal 73.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal. 91.

langsung dalam usaha mendiseminasi nilai-nilai Islam dan sekaligus data-data berupa dokumen yang bisa mendukung dalam penelitian ini.

Sedangkan objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini adalah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC PPP Kabupaten Banjarnegara dalam usaha mendiseminasi nilai-nilai Islam.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan ketepatan dan kekayaan data dan informasi yang diperoleh. Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut telah digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan tempat penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang strategi komunikasi politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara kepada informan yang bekerjasama atau terlibat langsung dalam proses strategi komunikasi politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan peneliti untuk mendukung data primer. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data sekunder adalah observasi dan dokumentasi. Data ini dapat berupa sumber bacaan dan berbagai sumber referensi lainnya yang terdiri atas surat pribadi, buku harian, nota, sampai dokumen resmi dari berbagai instansi. Data sekunder juga bisa berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi yang bisa mendukung dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode-metode tersebut digunakan untuk menggali data tentang subyek penelitian baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Data yang digali meliputi fakta, fenomena dan peristiwa terutama berupa tindakan

penuh arti dari sang aktor. Fakta berupa artefak-artefak yang memberikan informasi berkaitan dengan persoalan yang dikaji; Fenomenanya berupa gejala-gejala sosial seperti pemikiran, cita-cita, simbol-simbol, perasaan, interaksi, dan pengalaman. Sedangkan peristiwa berupa kejadian keseharian. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Metode Observasi Partisipan

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Fenomena ini mencakup interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diteliti.<sup>3</sup> Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap dalam penelitian, yang secara teknis untuk mengumpulkan data dengan cara langsung di lokasi penelitian mengenai strategi komunikasi politik.

Observasi disini penulis memposisikan diri sebagai observer partisipan, dimana peneliti berada di luar subjek yang diteliti namun mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap agenda atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

b) Metode *Depth Interview*

Interview adalah suatu proses tanya jawa lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Selain itu interview merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimanakah Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di kabupaten Banjarnegara. Adapun interview yang penulis gunakan adalah *depth interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 106.

<sup>4</sup> *Teknik Praktis Riset Komunikasi ...*, hal. 98.

### c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, internet dan media lainnya. Data dalam bentuk dokumentasi tersebut utamanya berkenaan dengan fokus penelitian ini, yaitu strategi komunikasi politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dokumentasi merupakan catatan atau arsip yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak banyak membutuhkan waktu dan energi serta dapat digunakan untuk pengecekan kembali informasi yang didapat melalui interview secara langsung. Selain itu, teknik ini digunakan untuk memperkuat dan menambah bukti-bukti dari wawancara.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif. Proses induktif ini diawali dengan kerja pengumpulan data secara teliti, mengembangkan teori (dugaan-dugaan) dan menguji validitasnya, dan selanjutnya menarik simpulan akhir. Dalam hal ini data yang dikumpulkan bukan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai ke-khususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti. Teori yang dikembangkan dimulai dari lapangan studi dari data yang terpisah-pisah dan atas bukti-bukti terkumpul saling berkaitan.<sup>5</sup>

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles & Huberman<sup>6</sup>, model analisis interaktif ini ada tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat<sup>7</sup>, proses kerja analisis terdiri dari tiga alur kegiatan. Proses tersebut terjadi bersamaan sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Tiga alur kegiatan tersebut ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/ verifikasi.

---

<sup>5</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), hal. 41.

<sup>6</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Edisi terjemahan* (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 16-20.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986) hal. 269.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan, abstraksi dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian dan cara pengumpulan data yang dipakai. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batasan permasalahan, menulis memo. Proses reduksi ini terus berlangsung sesudah penelitian lapangan dan sampai laporan akhir penulisan selesai.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Penyajian data dalam hal ini meliputi berbagai macam matriks, skema, jaringan kerja keterkaitan kegiatan dan tabel. Hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti sebagai informasi yang lengkap dan saling mendukung.<sup>8</sup>

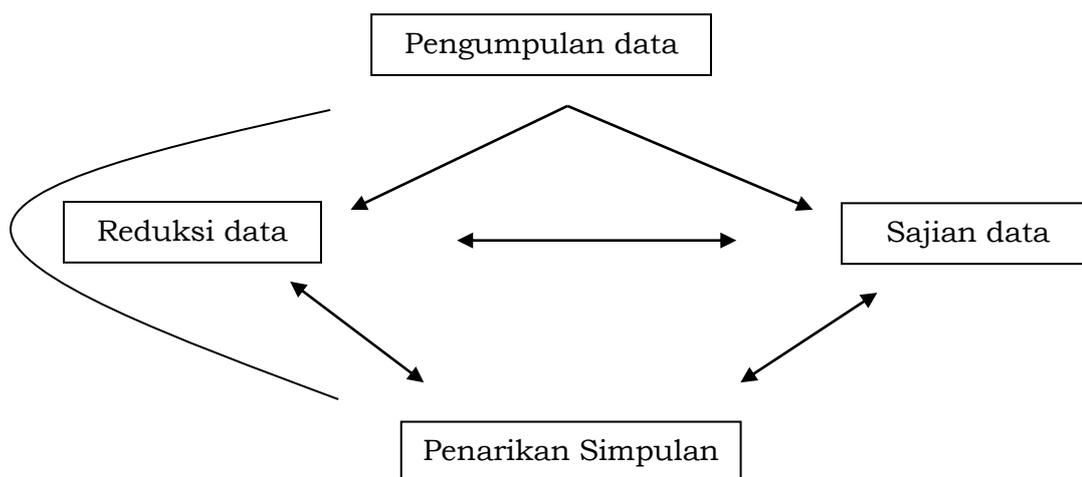
c. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan/verifikasi dari berbagai temuan di lapangan yang kemudian dilakukan reduksi dan disajikan informasi selanjutnya dilakukan penarikan simpulan. Langkah ini merupakan tahap akhir dalam analisis data namun peneliti masih dimungkinkan untuk melakukan verifikasi kembali pada pengumpulan sehingga simpulan menjadi lebih sempurna.

Model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ini sering disebut dengan model analisis interaktif. Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema berikut :

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat. 1986. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, hal. 9



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PPP**

##### **1. Letak Geografis**

Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam. Keberadaannya menjadi salah satu partai politik nasional yang memberikan ‘warna’ dalam membangun negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Partai yang berlambangkan ka’bah ini terbagi menjadi beberapa bagian wilayah kerja atau struktur organisasi kepemimpinan, diantaranya yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak Cabang (PAC) berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting (PR) berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.<sup>1</sup>

Sesuai dengan pembagian wilayah kerja tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan juga ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebagai Dewan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, DPC PPP Kabupaten Banjarnegara memiliki sekretariat(kantor) untuk dijadikan pusat kegiatan atau administrasi partai, baik yang bersifat internal maupun eksternal.<sup>2</sup> Adapun Sekretariat tersebut berada di jalan Selamanik No.10, Wangon, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53418.

---

<sup>1</sup> Anggaran Dasar PPP pasal 1 ayat 3 tentang Nama, Waktu dan Kedudukan, lihat juga pasal 12 tentang Struktur dan Pembentukan Organisasi Kepemimpinan

<sup>2</sup> Anggaran Dasar PPP pasal 70 ayat 1 dan 2 tentang Sekretariat, lihat juga UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 3 ayat 2 huruf d

## 2. Sejarah Berdirinya

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Hal itulah yang membuat PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklaratator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratator itu adalah KH Idham Chalid (Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama), H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, (Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia / Parmusi), Haji Anwar Tjokroaminoto, (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Partai Islam Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR).

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Perubahan ini dilakukan berdasarkan ketetapan MPR No. II tahun 1983, yang menyatakan antara lain bahwa Pancasila merupakan satu-satunya azas kekuatan sosial politik, khususnya partai politik dan golongan karya.<sup>3</sup>

Selain ketetapan MPR, pemerintah juga memperkuat ketetapan tersebut dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1985 tentang kepartaian

---

<sup>3</sup>Depdikbud. *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), Jilid 12. Hal 209

dan keormasan yang mengharuskan semua asas harus Pancasila.<sup>4</sup> Pada saat itu merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia, dimana hal ini bertujuan untuk menghilangkan pertentangan-pertentangan ideologi yang dinilai menghabiskan tenaga dan menghalangi pembangunan nasional.

Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala.*"

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum, pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu, Naro terpilih lagi menjadi ketua umum DPP PPP.

---

<sup>4</sup>A. Syarif Maarif, *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), hal. 67. Undang- Undang No. 3 Tahun 1985 tentang partai politik Angka 2 menyebut bahwa partai politik dan golongan karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pada ayat berikutnya disebut bahwa Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung.

Pada Muktamar VIII, PPP mengalami proses dualisme kepemimpinan antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmziy. Adanya dualisme kepemimpinan ini disebabkan adanya kisruh antar pimpinan dan elite partai politik. Hal ini berawal menjelang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimana Surya Dharma Alidianggap oleh sebagian besar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP. Namun pada akhirnya, perseteruan tersebut dimenangkan oleh kubu Romahurmziy dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menkumham RI Nomor: M.HH – 06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.

Sebagai partai politik yang berasaskan Islam, PPP memproklamkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.” Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP 2011-2015, Lukman Hakim Saifuddin, sebagaimana dijelaskan dalam

Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, pada 21-22 Oktober 2011 di Jakarta<sup>5</sup>, setidaknya-tidaknya ada tiga pengertian dari “PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam”, yaitu:

*Pertama*, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. Sebagaimana kita maklumi, di era reformasi banyak eksponen PPP yang pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak organisasi Islam yang merupakan pendiri atau pendukung PPP yang memberikan dukungan kepada partai politik baru. Namun, di rumah baru itu banyak eksponen PPP yang mengalami kekecewaan. Nah, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi mereka yang telah meninggalkan PPP untuk kembali lagi berjuang bersama PPP dalam menyalurkan aspirasi umat Islam serta menindaklanjutinya.

*Kedua*, PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita maklumi, PPP merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai macam langkah-langkah berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sejak PPP berdiri sampai kini. Sebagai kompensasi atas berdirinya PPP sebagai partai Islam, maka PPP meredam keinginan sebagian umat Islam itu sendiri untuk mendirikan negara Islam atau mengganti Pancasila dengan asas Islam, karena ternyata dalam negara Pancasila masih dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai kebebasan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting.

*Ketiga*, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>5</sup>[www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id), di akses pada tanggal 13 Februari 2020

Dilihat dari sisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, pernyataan “PPP sebagai rumah besar umat Islam” merupakan penegasan bahwa PPP merupakan hasil fusi atau gabungan dari beberapa partai politik Islam melalui sebuah deklarasi bersama pada 5 Januari 1973 (Miladiyah) bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqā’dah 1392 (Hijriyah). Jadi, kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya untuk membangun dan menggalang kebersamaan di antara partai politik Islam yang melakukan fusi dalam PPP.

Banyak yang berpandangan bahwa PPP hanya didirikan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu secara *de jure* dan *de facto* salah besar. Secara *de jure*, AD/ART PPP tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP. AD/ART hanya menyebut bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik.<sup>6</sup> Ini berarti para tokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu yang sejak dulu sampai kini tidak pernah diubah secara substansial menyadari bahwa selain empat partai politik yang berfusi itu, masih ada organisasi Islam yang menjadi pendukung dari keempat partai politik itu yang harus dimasukkan sebagai pendiri PPP.

Masih secara *de jure*, Khittah dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebut keempat partai Islam itu sebagai pendiri PPP, melainkan menyebutnya sebagai pihak yang mendeklarasikan PPP<sup>7</sup>. Deklarasi berasal

---

<sup>6</sup>Alinea kedua Mukaddimah AD/ART menyatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata’ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqā’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.”

<sup>7</sup>Dalam Khittah dan Program Perjuangan PPP dikatakan: “Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata’ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqā’dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan...”

dari kata *declare* yang berarti mengumumkan, menjelaskan, menyatakan, atau melaporkan. Ini berarti Khittah dan Program Perjuangan PPP juga menegaskan bahwa pendiri PPP tidak hanya terbatas pada deklarator saja, melainkan di balik itu masih ada organisasi Islam yang turut mendukung deklarasi itu, sehingga deklarasi itu bisa terlaksana dengan baik.

Masih secara *de jure*, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968 yang mengesahkan pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam yaitu Muhammadiyah, Jami'atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se-Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiah dan Wanita Islam. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, maka pendiri Parmusi secara otomatis juga merupakan pendiri PPP.

Hanya saja karena sebagian besar organisasi Islam pendiri Parmusi itu lebih mengonsentrasikan diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara AD/ART dan Khittah Program Perjuangan PPP berbicara dalam konteks politik, maka wajar jika yang dinyatakan secara eksplisit hanya partai Islam yang telah diakui sebagai partai politik, yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti.

Ringkasnya, secara *de jure* deklarator PPP adalah empat partai politik. Namun pendiri PPP adalah hampir seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah.

Selain itu secara *de facto*, klaim bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh organisasi Islam itu yaitu empat (4) partai politik yang menjadi deklarator serta enam belas (16) organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator memberikan mandat kepada PPP untuk

menyalurkan aspirasinya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua puluh organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP sebagai rumah besar umat Islam hanya pepesan kosong belaka.

Secara *de facto* juga, ketika PPP mendapat dukungan dari dua puluh organisasi Islam itu, PPP berhasil menorehkan sejarah, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Bersama organisasi Islam, PPP menjadi partai politik yang gigih memperjuangkan kepentingan politik umat Islam, dengan segala macam risiko, seperti penahanan, intimidasi, dan bahkan siksaan. Itu semua dilakukan oleh aktivis PPP karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wata'ala serta sesuai dengan aspirasi umat Islam dan organisasi Islam.

### **3. Lambang, Visi dan Misi PPP**

#### **a. Lambang PPP**

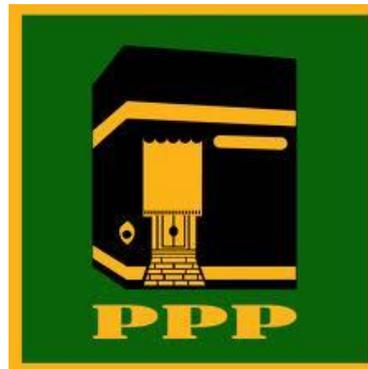
Lambang PPP pada awal berdirinya dalam sejarah politik indonesia, PPP berlambangkan ka'bah. Lambang tersebut diidentitaskan sebagai lambang dan simbol umat islam di seluruh indonesia dan dunia. Namun, dibawah tekanan orba, PPP akhirnya menanggalkan asas islam dan lambang ka'bahakibat diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1985 tentang perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Akibat pemberlakuan UU partai politik yang baru tersebut, pada muktamar I PPP tahun 1984, PPP secara resmi menggunakan asas pancasila dan mengganti lambang ka'bah dengan bintang dalam segi lima.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Moch. Nurhasim, "Stagnasi Elektoral Partai Persatuan Pembangunan" dalam *Masa Depan Partai Islam di Indonesia*, ed. Moch. Nurhasim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 170



Lambang Lama



Lambang Baru

Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad tepat di sudut dinding, di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga pasal 1 ayat 1, lambang PPP adalah Ka'bah yang diartikan sebagai simbol pemersatu Umat Islam. Sedangkan Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.

#### b. Visi PPP

Visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman”.

Khusus di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang, Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keIndonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya *good and clean government*, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,

pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia

dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

c. Misi PPP (Khidmat Perjuangan)

- 1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
- 3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
- 4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP

mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

- 5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

#### 4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan DPW PPP Jawa Tengah Nomor 444.46/ SK/ K/VIII/2019 pada tanggal 17 Agustus 2019, berikut adalah Susunan Personalia Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara.

**SUSUNAN PERSONALIAPELAKSANA TUGAS  
DPC PPP KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH  
PERIODE 2016-2021**

**JAJARAN Plt. KETUA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Edy Purwanto	Ketua
2.	Drs. H. Indarto	Wakil Ketua
3.	Galih Pamungkas	Wakil Ketua
4.	Arya Akhmad Zakaria, SH, MH	Wakil Ketua

**JAJARAN PIt. SEKRETARIS**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Supriyadi, SE	Sekretaris
2.	Fahmi Assidiqi, AMd	Wakil Sekretaris
3.	Abdul Mufid	Wakil Sekretaris
4.	Hj. Lilis Ujianti, S.Ag, M. Pd	Wakil Sekretaris

**JAJARAN PIt. BENDAHARA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dian Eka Winartiningsih, SE	Bendahara
2.	Eling Setyawati	Wakil Bendahara
3.	Arif Adiyanto	Wakil Bendahara

**MAJELIS SYARIAH****DEWAN PIMPINAN CABANG**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KH. Ali Hanan	Ketua
2.	KH. Syaefudin Hamzah	Sekretaris

**MAJELIS PERTIMBANGAN  
DEWAN PIMPINAN CABANG**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KH. Wahyno Tajudin Achmad, S.Pd.I	Ketua
2.	KH. Iqbal Amar	Sekretaris

**MAJELIS PAKAR  
DEWAN PIMPINAN CABANG**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Akhmad Khuzaeni	Ketua
2.	Abdul Mufid	Sekretaris

Partai Persatuan Pembangunan khususnya DPC PPP Kabupaten Banjarnegara, memiliki PAC (Pimpinan Anak Cabang) di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 20PAC. Sedangkan untuk keorganisasian partai di tingkat desa/ kelurahan yang biasa disebut dengan Pimpinan Ranting (PR) belum memenuhi 100% dari 278 desa atau kelurahan, baru terbentuk 256 PR di desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.<sup>9</sup>

### 5. Program Kerja

Cita-cita Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>9</sup>Data diolah dari hasil interview dengan bapak Indarto 8 November 2020 pukul 15.00

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PPP memiliki enam (6) prinsip perjuangan partai yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap program kerjanya, diantaranya yaitu :

- a. **Prinsip Ibadah:** PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridaan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.
- b. **Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar:** PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong pelaksanaan perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (*munkar*). Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. Dengan prinsip ini PPP berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi *political decay* (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih dalam pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran.
- c. **Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan:** Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran yang mutlak hanya Allah *Subhanahu Wata'ala* yang Maha Benar. Karena itu sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara

itu, Prinsip kejujuran atau *amanah* bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketenteraman. Prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. PPP juga akan terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (*justice*) adalah esensial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, ketenteraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.

- d. **Prinsip Musyawarah:** PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mencegah munculnya diktator mayoritas.
- e. **Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan:** PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat

memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.

- f. **Prinsip Istiqamah:** PPP menjadikan prinsip *istiqamah* atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, terguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar *istiqamah* sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemandirian dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional;

Sesuai dengan Musyawarah Kerja Cabang DPC PPP Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024 mencanangkan program kerja yang dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah bidang sumber daya manusia, organisasi, keuangan, manajemen, dan penguasaan wilayah.

- 1) Bidang Sumber Daya Manusia
  - a) Perekrutan kader
  - b) Pendidikan politik secara terbuka
  - c) Melakukan kajian dan diskusi politik secara komprehensif
  - d) Pelatihan kaderisasi secara berjenjang yang berbasis daerah pemilihan
  - e) Pengorganisasian kader terlatih secara baik, terkonsep, dan terarah
- 2) Bidang Organisasi
  - a) Konsolidasi organisasi
  - b) Memperluas jaringan

- c) Advokasi kepada masyarakat
- 3) Bidang Keuangan
  - a) Melakukan loby politik dengan pemerintah
  - b) Mengintesifkan penarikan dana terhadap kader yang duduk di jabatan legislatif maupun eksekutif
  - c) Mengusahakan amandemen terhadap seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang dana partai politik yang secara materil bermuatan lebih memihak kepada kepentingan politik
- 4) Bidang Manajemen
  - a) Penggarapan dan pengelolaan sistem manajemen partai konvensional dan tradisional menjadi partai yang modern
- 5) Bidang Penguasaan Wilayah
  - a) Pembentukan manajemen dapil

**B. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan suprastruktur dan Infrastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara**

**1. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan Suprastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara**

**a. Memahami Khalayak**

Seorang perancang komunikasi yang baik tidak akan memulai upayanya dari “apa yang harus dikatakan”, “saluran apa yang akan dipergunakan”, atau “bagaimana cara mengatakannya”, melainkan terlebih dahulu mempertanyakan “siapa yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan”.

Secara umum PPP dalam memahami khalayak dengan cara melihat bagaimana status khalayak yang akan di hadapi. Status disini

diartikan dari kalangan mana khalayak itu berasal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indarto, yaitu :

“... setiap kita akan berkomunikasi, pasti kita mencari tahu dengan siapa kita akan berkomunikasi, dari kalangan mana mereka berasal, kalau dengan pejabat pemerintah, kita biasanya mengelompokan mereka sebagai kelompok politik, kalau dengan masyarakat kita biasanya menyebutnya kelompok sosial.. karena cara berbicara dengan kedua kelompok tersebut akan berbeda..”<sup>10</sup>

Ia juga menambahkan :

“... salah satu contohnya semisal kita berkomunikasi dalam rapat di ruang sidang, cara berkomunikasi kita tentu disesuaikan dengan agenda rapat sidang. Pembahasan Raperda tentang perubahan pengawasan dan pengendalian MIRAS contohnya. Dalam berkomunikasi sifatnya kita lebih menekan kepada pembuat kebijakan untuk mempertegas sanksi atas pelanggaran tersebut .. hal ini kami tuangkan dalam pandangan umum maupun pendapat fraksi..”

Hal senada juga diungkapkan oleh Lilis Ujianti, yaitu :

“... kita tidak bisa menyamakan cara berbicara kepada semua orang, kita harus melihat dari kalangan mana, apakah pemerintah atau masyarakat.. ”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujianti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

“...kita tidak serta merta berbicara, kita juga harus tahu, dengan siapa kita berhadapan .. bagaimana latar belakang mereka, profesi mereka, dan kalau memungkinkan kita juga harus tahu kepribadian mereka..” ungkap Edy.<sup>12</sup>

Melihat bagaimana PPP merumuskan khalayak dengan pengelompokan, maka ini akan memudahkan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Cangara sendiri menyebut khalayak sebagai pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber yang dapat berupa satu orang atau lebih, kelompok, partai, bahkan negara.<sup>13</sup>

Suprastruktur politik memiliki peran penting dalam mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini yang nantinya kedepan akan membentuk dan membawa kearah mana sasaran yang akan dituju sesuai dengan saran dan masukan dari unsur yang ada dalam suprastruktur politik. Hal inilah yang membuat PPP dalam mengelompokan suprastruktur politik masuk ke dalam kategori kelompok politik.

Penerima merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena merupakan sasaran komunikasi. Khalayaklah yang akan mencerna dan menerjemahkan pesan yang disampaikan dan atau meneruskan pesan tersebut sesuai dengan tujuan dari proses

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

<sup>13</sup>Cangara, (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007),

komunikasi yang terjadi. Karena kecenderungan khalayak yang selalu berkembang, tidak statis tapi juga tidak selamanya dinamis. Maka akan lebih mudah melakukan pendekatan apabila kita memahami karakteristik dari khalayak tersebut.<sup>14</sup>

Adapun karakteristik kelompok politik sendiri dalam kaca mata PPP cenderung kaku dan prosedural. Mereka dalam berkomunikasi tidak bisa lepas dari regulasi dan sesuai dengan tupoksi mereka. Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan Indarto, yaitu :

“... untuk suprastruktur secara proses komunikasi politik, biasanya dalam forum sidang/ rapat, ini sangat kaku, namun kami dapat memahami itu,, karena mereka membawa kelembagaan mereka masing-masing,, jadi komunikasi mereka sesuai dengan tupoksinya...”<sup>15</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Edy Purwanto,:

“... selama ini dalam menjalankan komunikasi dengan pihak pemerintah, dalam setiap pembahasan apapun dalam rapat atau sidang, pemerintah selaku eksekutif dalam berkomunikasi dan bertindak sesuai dengan kewenangannya... namun disisi lain, kalau kita

---

<sup>14</sup>Ruli Nasrullah,. “*Riset Khalyak Digital Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial*”, Jurnal Sosioteknologi, Vol.17 No.2, Agustus 2018.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

berkomunikasi secara pribadi tanpa membawa nama lembaga, apapun jabatan mereka,, kita sudah seperti saudara ...”<sup>16</sup>

Memiliki pengetahuan dan memahami tentang karakter khalayak sangatlah penting. Sebab melalui pemahaman karakter khalayak inilah seorang komunikator mampu memaksimalkan proses komunikasi yang dilakukannya. Acuannya adalah tidak hanya tersampaikan pesan komunikasi dari komunikator ke khalayak, lebih dari itu ada efek yang muncul setelah terjadinya proses komunikasi tersebut. Efek yang dimaksud disini adalah efek yang positif.

Dalam setiap komunikasi dengan suprastruktur politik, PPP lebih sering bersentuhan langsung dengan bupati atau wakil bupati selaku eksekutif dan anggota dewan selaku legislatif. Hal ini mengingat pihak eksekutif mempunyai *legitimate power* dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Sedangkan untuk legislatif, legislatif sendiri juga mempunyai *legitimate power* sebagai pengawas dalam setiap langkah eksekutif.

“... sejauh ini, dalam komunikasi politik, kita lebih sering berkomunikasi dengan pihak eksekutif maupun legislatif. Kenapa harus dengan mereka? Karena mereka mempunyai kewenangan dalam

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

mengambil keputusan maupun kebijakan ...” ungkap Edy Purwanto selaku Plt.ketua DPC PPP.<sup>17</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Supriyadi selaku Sekretaris DPC,:

“...menjalin komunikasi politik, biasanya kita lakukan dengan pihak yang mempunyai kewenangan, misalnya bupati atau anggota dewan ...”<sup>18</sup>

Salah satu unsur komunikasi adalah adanya komunikan atau penerima pesan. Latar belakang atau status komunikan dalam komunikasi politik juga ikut mempengaruhi pesan apa yang akan disampaikan sehingga menimbulkan efek atau *feedback*.

Secara garis besar ada 2 tipe khalayak, yaitu *general public audience* dan *specialized audience*.<sup>19</sup> *General public audience* merupakan khalayak yang sangat luas, heterogen dan anonim secara lengkap. Contoh dari tipe *general public audience* ini adalah pemirsa televisi dan pendengar radio. Sedangkan tipe *specialized audience* dibentuk dari beberapa macam kepentingan bersama antar anggotanya sehingga lebih homogen (paling tidak dalam satu aspek tertentu).

Elemen suprastruktur politik bisa dikatakan satu kesatuan dari birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah sendiri mempunyai

---

WIB

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 14.30 WIB

<sup>19</sup>Endang S. Sari, *Audience Research*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 1993), 27

kewajiban dalam mencanangkan dan membuat keputusan-keputusan politik. Dengan demikian, baik antara partai politik maupun suprastruktur politik memiliki kepentingan yang sama.

Dengan menjalin komunikasi secara intens baik dengan silaturahmi maupun musyawarah, antara komunikator kepada komunikan akan tercipta dengan sendirinya ikatan emosional. Ikatan emosional inilah yang nantinya akan lebih memudahkan dalam melakukan strategi komunikasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Galih Pamungkas selaku wakil ketua DPC PPP dan anggota Fraksi PPP, yaitu:

“... karena kita memiliki kepentingan yang sama, dalam artian sama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara, jadi kita sering berkomunikasi dengan cara silaturahmi maupun musyawarah dalam beberapa kesempatan pada akhirnya efek yang timbul itu ikatan emosional .. nah adanya ikatan emosional inilah yang memudahkan kita untuk saling memahami akan kepentingan kita ...”<sup>20</sup>

Dian juga menambahkan:

“... silaturahmi merupakan salah satu point dalam meloloskan kepentingan kita. Tanpa silaturahmi, kita tidak bisa mendekati dan memahami karakter lawan bicara kita .. kalau kita sering menjalin komunikasi bahkan intens mengadakan pertemuan, besar

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Galih Pamungkas pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.00 WIB

kemungkinan kita dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam akan lebih mudah ..”<sup>21</sup>

Hal yang sependapat juga diungkapkan oleh anggota fraksi PPP Arya Achmad Zakaria yang sekaligus wakil ketua DPC PPP. Dia mengungkapkan sebagai berikut,:

“... kita dalam satu minggu, kalau dibikin rata-rata, kita akan melakukan/melaksanakan sidang atau rapat 3-4 hari dalam satu minggu, karena rutinitas tersebut, memunculkan kedekatan emosional kita ...”<sup>22</sup>

Ikatan emosional merupakan sebuah ikatan psikologis antara individu dengan individu lainnya. Faktor yang melatarbelakangi munculnya ikatan emosional antara lain etnis, agama, ideologi, gender, asal daerah, dan citacita. Ikatan emosional juga memiliki peran penting dalam komunikasi interpersonal (*face to face*), sehingga pesan komunikasi politik yang disampaikan akan mudah diterima dan disetujui.

#### **b. Menyusun Pesan Persuasif**

Komunikasi politik berperan menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi kebijaksanaan. Karena itu komunikasi politik

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Dian Eka Winartiningsih pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakaria pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.0 WIB

secara keseluruhan tidak dapat dipahami, kecuali apabila dihubungkan dengan dimensi politik dalam segala aspek dan problematikanya. Bila komunikasi berjalan lancar, wajar, dan sehat, sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan masyarakat sesuai dengan tuntunan zaman.

Untuk mewujudkan kebijakan yang diharapkan, dalam komunikasi politik diperlukan merumuskan pesan persuasif. Pesan persuasif sendiri adalah suatu upaya untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau bahkan juga tindakan penerima pesan demi mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menyusun pesan persuasif tidaklah mudah. Apalagi jika yang menyusun pesan tidak memahami karakter khalayak atau lawan bicara. PPP dalam menyusun pesan persuasif, sebelumnya akan mengkaji dan memahami khalayak terlebih dahulu. Selanjutnya PPP merumuskan cara penyusunan pesan persuasif.

“ .. ada trick/cara kita dalam membuat orang lain langsung memperhatikan apa yang kita bicarakan, salah satunya adalah dengan memulai pembicaraan dengan isu atau tema yang menarik ..”ungkap Supriyadi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

Hal yang senada juga disampaikan oleh Edy Purwanto,<sup>24</sup>

“.. dalam membuat pesan, kita biasanya mengangkat tema-tema yang menarik dan kekinian, dengan mengangkat tema yang menarik, itu akan lebih menggugah perhatian lawan bicara kita ...”.

Hal serupa juga diungkapkan Dian Eka Winartiningsih, namun dia menambahkan bahwa selain menarik dan aktual, penyusunan pesan persuasif juga harus dapat memunculkan semangat .. sehingga lawan bicara kita akan fokus dan mengikuti (mendengarkan/memperhatikan) pesan yang kita sampaikan..<sup>25</sup>

Ia juga menambahkan:

“...dalam proses berkomunikasi dengan masyarakat, dalam situasi tertentu, misalnya komunikasi dengan sasaran massa yang banyak, pola komunikasinya pasti akan sedikit berbeda, dalam proses ini lebih sering menggunakan kalimat-kalimat penekanan, orasi, dan juga kalimat-kalimat yang dapat memunculkan semangat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.”

Dalam kesempatan lain, Lilis Ujianti juga mempertegas bahwa penyusunan pesan persuasif haruslah rasional sehingga mampu memunculkan emosional.

“..kelompok politik (suprastruktur politik) terkadang jarang memerhatikan ketika pembicara hanya berbicara mengenai wacana,

---

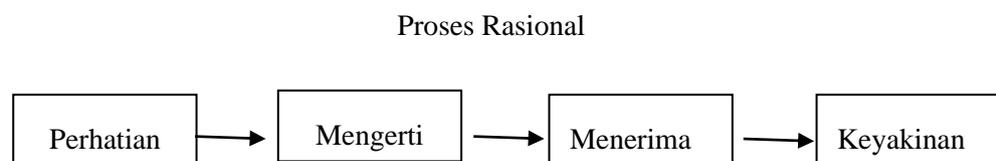
WIB

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Dian Eka Winartiningsih pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

tetapi pembicara juga harus mampu menunjukkan bukti nyata, data akurat, dan solusi alternatif terhadap tema atau permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat ,, dengan begitu mereka akan *open mind* dan tergerak,,” ujar Lilis Ujianti.<sup>26</sup>

Persuasif dapat dilakukan baik secara rasional maupun emosional.<sup>27</sup> Dengan cara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek-aspek yang dipengaruhi dapat berupa ide ataupun konsep, sehingga pada seseorang terbentuk keyakinan. Secara skematik, proses yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:



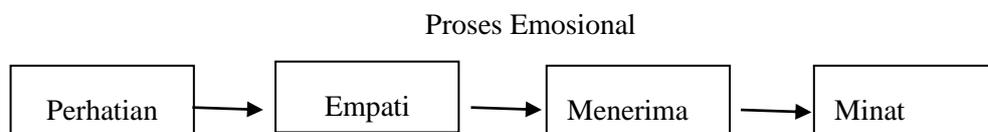
Persuasi yang dilakukan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara ini, aspek simpati dan empati seseorang digugah, sehingga muncul proses senang pada diri orang yang dipersuasi. Proses persuasi secara emosional dapat digambarkan sebagai berikut:

---

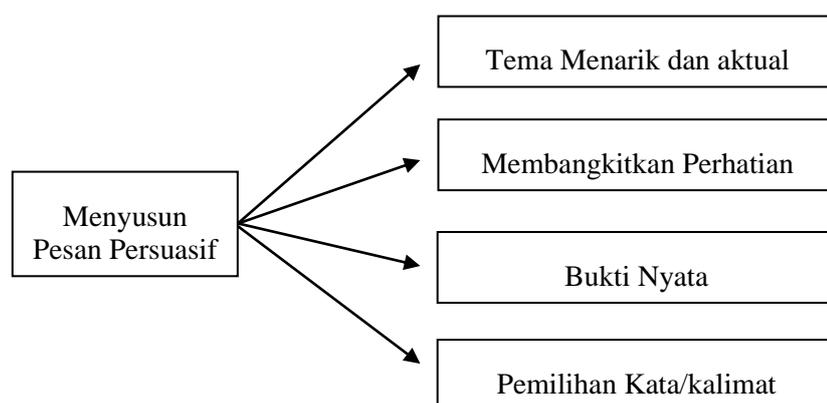
WIB

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujianti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

<sup>27</sup>Mar’at, *Sikap Manusia : Perubahan serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 36.



Mencermati cara-cara yang dilakukan PPP dalam komunikasi politik kepada suprastruktur politik sebagaimana yang dinyatakan oleh informan maka jika dibuat dalam bentuk skema, PPP dalam menyusun pesan persuasif sebagai berikut:



Melihat skema yang digambarkan diatas, upaya menyusun pesan persuasif PPP untuk menghadapi suprastruktur politik dalam kacamata komunikasi menggunakan konsep *AIDDA* yang juga dikenal dengan *Adaption process*, yaitu : *attention*, *interest*, *desire*, *decision*, dan *action*. Artinya, semua dimulai dengan membangkitkan perhatian (*attention*), kemudian menumbuhkan minat dan kepentingan (*interest*), sehingga khalayakmemiliki hasrat (*desire*) untuk menerima

pesan yang dirangsangkan oleh komunikator, dan akhirnya diambil keputusan (*action*).<sup>28</sup>

c. Metode

Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik juga tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (PEMILU) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian maka menjadi seorang komunikator politik, dirinya dituntut untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Namun, dia juga harus mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi guna memudahkan khalayak dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Kecakapan-kecakapan yang dimiliki seorang komunikator politik dalam menyampaikan pesan akan terlihat dari bagaimana dirinya menerapkan metode-metode penyampaian pesan.

Metode komunikasi politik adalah cara teknis yang akan diaplikasikan komunikator politik dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. PPP sebagai komunikator politik juga mempunyai

---

<sup>28</sup>*Komunikasi Politik....*, hal. 89

metode-metode tertentu dalam menyampaikan pesannya. Adapun metode yang digunakan tidak tetap, artinya PPP menerapkan metode komunikasi politik disesuaikan dengan kondisi situasi di lapangan. Hal ini diutarakan oleh Indarto, yaitu:<sup>29</sup>

“ ... metode atau teknik yang kita gunakan kepada suprastruktur politik, biasanya kita mengikuti pola komunikasi mereka...artinya komunikasi yang kita terapkan disesuaikan dengan lingkungan dimana komunikasi itu terjadi... ”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Indarto dalam memahami khalayak bahwa suprastruktur politik pola komunikasinya cukup kaku, hal ini dikarenakan moment bertemu dengan mereka intensitasnya cenderung seremonial (dalam forum formal), hanya sebatas komunikasi yang sesuai tupoksinya masing-masing. Dia juga menambahkan, :

“... dalam berkomunikasi dengan jajaran suprastruktur politik di Kabupaten Banjarnegara.. itu tidak lepas dari kebijakan dan regulasi-regulasi yang mengikat .. maka dari itu kita juga dalam menyampaikan pesan menggunakan regulasi-regulasi sebagai bentuk ketegasan/penekanan kita ....” imbuhnya.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

Dalam kesempatan lain, Arya Achmad Zakariya juga menyampaikan pendapatnya,<sup>30</sup>

“tipikal orang itu berbeda-beda .. ada yang mudah ada yang “sulit” .. nah yang sulit ini memerlukan ketegasan dalam penyampaian pesan, salah satu caranya dalam penyampaian pesan kita mendasarinya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.. jadi tidak asal berbicara .. apalagi kalau menyangkut kepentingan umat Islam”

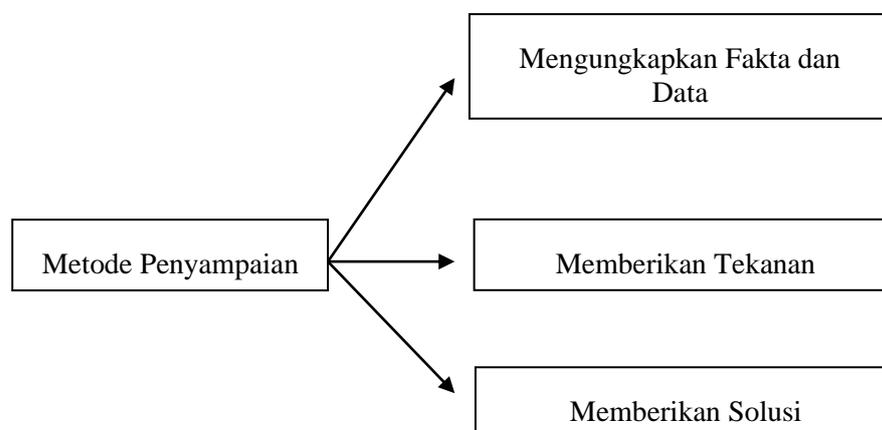
“... metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kelompok politik (suprastruktur), kita mengawali dengan memaparkan kondisi yang ada, baik dari fakta maupun datanya, setelah itu kita memberikan tekanan dengan diimbangi solusi alternatifnya...biasanya hal ini kita paparkan dalam pandangan umum fraksi ataupun pendapat fraksi,, nah, salah satu contohnya sebagai bentuk perjuangan untuk umat islam adalah saat pembahasan perubahan perda miras ” ujar Edy Purwanto.<sup>31</sup>

Mencermati apa yang disampaikan oleh informan, maka PPP dalam menetapkan metode penyampaian komunikasi politik dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakariya pada tanggal 30 November 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB



Menganalisis skema metode penyampaian komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC PPP Kabupaten Banjarnegara sebagaimana yang digambarkan diatas, PPP dalam menyampaikan pesan komunikasi politiknya menggunakan metode kombinasi antara metode *informatif*, *educatif*, dan *cursive*. Pemilihan keputusan metode kombinasi ini didasari atas situasi dan kondisi komunikator dalam menyampaikan pesan komunikasi politik kepada komunikan.

**d. Memilah dan Memilih Media**

Media merupakan salah satu saluran yang paling ampuh menyampaikan pesan-pesan politik. Dalam kerangka ini media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik kepada khalayak antara lain berupa teks atau berita politik yang memuat simbol dan fakta politik. Dengan menggunakan media, pemahaman tentang politik menjadi lebih mudah. Dalam konteks politik modern, media tidak hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi juga

memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan, begitu juga aspirasi masyarakat harus diartikulasikan, semuanya membutuhkan media untuk menyampaikannya.

Keberadaan komunikasi politik di media membuka peluang luas bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami dan beropini tentang baik buruknya sistem politik. Peran media ini tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjangkau jumlah khalayak yang tidak terbatas. Lebih dari itu setidaknya sampai tingkat tertentu, publik juga menjadikan informasi yang diperoleh dari media sebagai rujukan bagi pemahaman dan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa penting. Informasi media kemudian membentuk persepsi, pendapat, sikap dan akhirnya tindakan publik. Dengan kata lain, publik menggantungkan pemenuhan kebutuhan informasi politik pada media massa.

Namun berbeda halnya dengan penggunaan media yang dilakukan oleh PPP dalam strategi komunikasi politik. Media yang digunakan bukanlah media massa, akan tetapi media yang sering digunakan adalah media forum pertemuan yang menekankan kepada saluran komunikasi interpersonal atau biasa dikenal dengan komunikasi *face to face*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edy Purwanto,:

“,, dalam beberapa kesempatan, menyampaikan komunikasi politik secara langsung lebih efektif hasilnya daripada menyampaikan

lewat media,, adapun lewat media biasanya kalau sudah menjadi produk hukum, contohnya perubahan perda miras<sup>32</sup>

“penyampaian pesan kita lebih sering mengadakan tatap muka dan menyampaikan langsung, misal bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati atau jajaran eksekutif lainnya” imbuh Indarto.<sup>33</sup>

Di sisi lain, Supriyadi juga menerangkan kelebihan daripada komunikasi tatap muka, diantaranya adalah komunikakator akan langsung mendapatkan jawaban atau *feedback* dari komunikan.

“...keuntungan daripada komunikasi langsung (tatap muka) ini, kita jadi lebih tahu bagaimana reaksi lawan bicara kita dan kita lebih dapat meminimalisir miskomunikasi...” ungkap Supriyadi.<sup>34</sup>

Ia juga menambahkan bahwa sebetulnya DPC PPP Kabupaten Banjarnegara juga memiliki media sosial online, diantaranya Facebook (nama akun ppp-banjarnegara), Twitter (nama akun @dpc\_pppbara45), Instagram (nama akun dpcppp\_banjarnegara) dan laman web dengan alamat <https://www.ppp-banjarnegara.com>. Namun menurutnya, media tersebut kurang efektif manakala digunakan sebagai media dalam proses komunikasi politik.

Adapun media yang ada di kabupaten banjarnegara diantaranya adalah sebagai berikut:

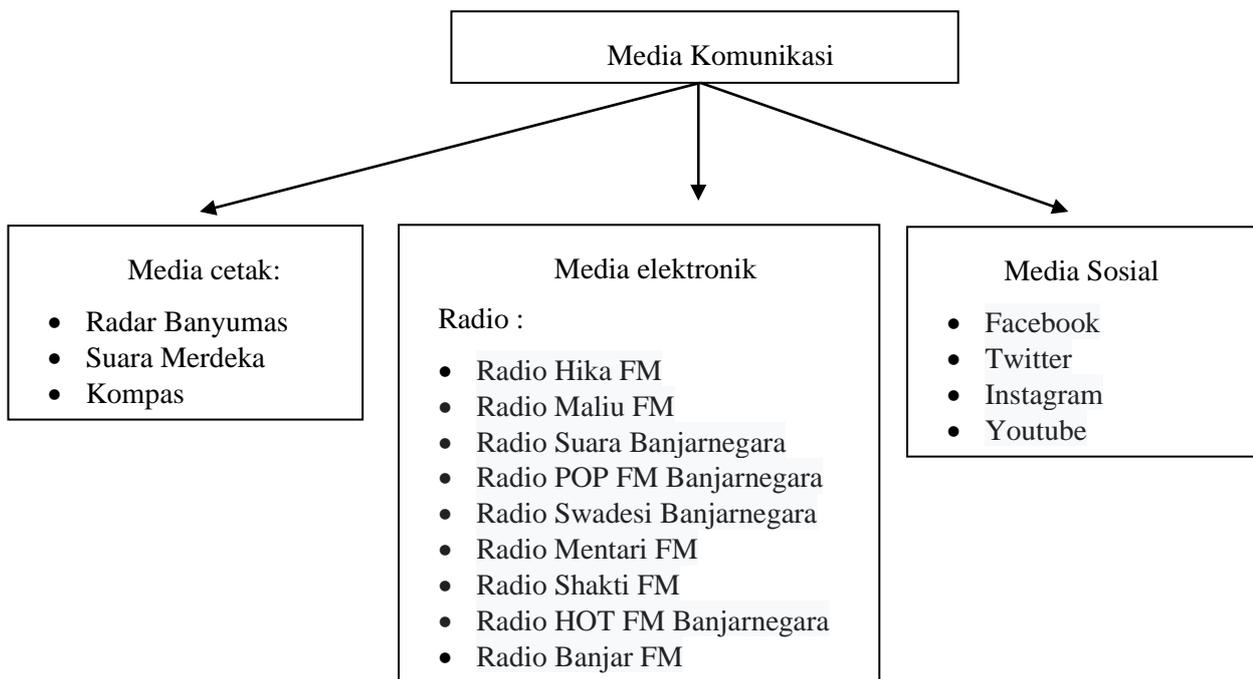
WIB

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 14.00 WIB



Pemilahan dan pemilihan media komunikasi politik yang dilakukan PPP dengan cara menginventarisir media yang ada baik media cetak, elektronik maupun media sosial yang kemudian dengan mempertimbangkan keefektifannya, sedikit banyak akan mempengaruhi kepada komunikasi dalam memahami pesan komunikasi politik. Dalam menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi politik, tidaklah serta merta dapat berhasil dengan baik. Justru harus menggunakan strategi dan kerja-kerja politik yang profesional dan terukur. Hal ini dikarenakan membicarakan politik dengan saluran antar pribadi merupakan partisipasi politik yang aktif, sedangkan pengenalan komunikasi politik melalui media massa bersifat relatif lebih pasif.

## 2. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan Infrastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara

### a. Memahami Khalayak

Infrastruktur politik merupakan pusat kekuasaan politik rakyat atau bagian paling dasar politik dalam masyarakat. Johan Jasin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*<sup>35</sup> mengartikan infrastruktur politik sebagai suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kegiatan lembaga kemasyarakatan tersebut dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya. Tujuan utama infrastruktur politik adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai simpati kepada partai atau sosok figur yang sesuai dengan ideologi politiknya. Artinya, partai atau kandidat yang tidak sesuai dengan ideologi politiknya akan ditinggalkan. Itulah sebabnya harus dibuat peta tentang ideologi, agama dan tradisi setiap individu atau

---

<sup>35</sup>Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016) hal. 136.

pola yang ada dalam masyarakat, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Indarto, yaitu”

“Dalam proses mengambil hati infrastruktur politik tidak mudah, strategi yang kami lakukan adalah dengan memilah karakteristik dari infrastruktur politik itu sendiri. Kita ambil contoh infrastruktur perwakilan dari organisasi masyarakat, berbeda karakteristik organisasi masyarakat, tentu saja bahasa yang digunakan akan berbeda pula, sebagai contoh ketika berbicara dengan kaum petani tentu akan berbeda dengan ketika berbicara dengan kaum pengusaha.”<sup>36</sup>

Edy Purwanto juga menambahkan bahwa,:

“,,,dalam proses komunikasi dengan infrastruktur politik selain memahami karakteristiknya juga harus mengetahui dan memahami kebutuhan dan motivasinya. Demikian juga pengetahuan dan kemampuan dari inrastruktur politik dalam mengakses pesan-pesan politik..”<sup>37</sup>

Secara umum PPP dalam memahami khalayak dengan cara melihat bagaimana status khalayak yang akan di hadapi. Status disini diartikan dari kalangan mana khalayak itu berasal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indarto, yaitu :

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

“... setiap kita akan berkomunikasi, pasti kita mencari tahu dengan siapa kita akan berkomunikasi, dari kalangan mana mereka berasal, kalau dengan pejabat pemerintah, kita biasanya mengelompokan mereka sebagai kelompok politik, kalau dengan masyarakat kita biasanya menyebutnya kelompok sosial.. karena cara berbicara dengan kedua kelompok tersebut akan berbeda..”<sup>38</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Lilis Ujianti, yaitu :

“... kita tidak bisa menyamakan cara berbicara kepada semua orang, kita harus melihat dari kalangan mana, apakah pemerintah atau masyarakat...”<sup>39</sup>

“...kita tidak serta merta berbicara, kita juga harus tahu, dengan siapa kita berhadapan ..” ungkap Edy.<sup>40</sup>

Melihat bagaimana PPP merumuskan khalayak dengan pengelompokan, maka ini akan memudahkan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Cangara sendiri menyebut khalayak sebagai pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber yang dapat berupa satu orang atau lebih, kelompok, partai, bahkan negara.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

WIB

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujianti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

WIB

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

<sup>41</sup>Cangara, (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 25.

Infrastruktur politik merupakan pusat kekuasaan politik rakyat atau bagian paling dasar politik dalam masyarakat. Apabila suprastruktur politik lebih mengarah pada kekuasaan lembaga formal negara, maka infrastruktur politik ini lebih bersifat eksternal, yaitu kekuasaan politik di luar lembaga formal negara. Meskipun posisi infrastruktur politik berada diluar kekuasaan lembaga formal, kekuatannya tidak bisa diremehkan.

Khalayak merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena merupakan sasaran komunikasi. Khalayaklah yang akan mencerna dan menerjemahkan pesan yang disampaikan dan atau meneruskan pesan tersebut sesuai dengan tujuan dari proses komunikasi yang terjadi.

Tokoh politik merupakan orang-orang yang lalu lalang di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik berperan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Karena kecenderungan khalayak yang selalu berkembang, tidak statis tapi juga tidak selamanya dinamis. Maka akan lebih mudah melakukan pendekatan apabila kita memahami karakteristik dari khalayak tersebut.<sup>42</sup>

Berbicara mengenai infrastruktur politik tidak lepas dari kelompok kepentingan, kelompok kepentingan merupakan suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi dan

---

<sup>42</sup>Ruli Nasrullah,. “Riset Khalyak Digital Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual diMedia Sosial”, JurnalSosioteknologi, Vol.17 No.2, Agustus 2018.

meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya. Kelompok kepentingan ini bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kepentingan dianggap sebagai infrastruktur politik karena mereka memberikan masukan yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya.

“...lembaga atau organisasi masyarakat mempunyai peran penting dalam memberi masukan, dengan mereka memberikan masukan kita mendapatkan *input* dari bawah ..” ungkap Lilis Ujjanti.<sup>43</sup>

Di sisi lain, Arya Ahmad Zakariya juga menambahkan,:

“...Instrument masyarakat itu sangat kompleks, kalau kita berbicara politik, setiap orang mempunyai kepentingan,,namun ada juga yang hanya menekan karena mereka berada di pihak oposisi ..”<sup>44</sup>

Kelompok penekan hampir mirip dengan kelompok kepentingan, yaitu sama-sama memiliki tujuan tertentu terhadap pemerintah. Kelompok kepentingan lebih fokus pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok. Kelompok kepentingan juga lebih fokus terhadap proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Sementara

---

WIB

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujjanti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakariya pada tanggal 30 November 2020 pukul 09.30 WIB

kelompok penekan lebih fokus pada usaha memengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Jadi, perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan terletak pada cara dan sasarannya.

Dengan menjalin komunikasi secara instens, antara komunikator kepada komunikan akan tercipta dengan sendirinya ikatan emosional. Ikatan emosional inilah yang nantinya akan lebih memudahkan dalam melakukan strategi komunikasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Galih Pamungkas selaku wakil ketua DPC PPP dan anggota Fraksi PPP, yaitu:

“... karena kita memiliki kepentingan yang sama, dalam artian sama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara, kita jadi sering berkomunikasi yang efeknya timbul ikatan emosional ... nah adanya ikatan emosional inilah yang memudahkan kita untuk saling memahami akan kepentingan kita ...”<sup>45</sup>

Hal yang sependapat juga diungkapkan oleh anggota fraksi PPP Arya Achmad Zakaria yang sekaligus wakil ketua DPC PPP. Dia mengungkapkan sebagai berikut,:

“... kita mencoba sesering mungkin berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya di acara formal saja, tetapi juga di acara-

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Galih Pamungkas pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.0 WIB

acara non formal seperti silaturahmi, karena rutinitas tersebut, memunculkan kedekatan emosional kita ...”<sup>46</sup>

Ikatan emosional merupakan sebuah ikatan psikologis antara individu dengan individu lainnya. Faktor yang melatarbelakangi munculnya ikatan emosional antara lain etnis, agama, ideologi, gender, asal daerah, dan cita-cita.

Secara garis besar ada 2 tipe khalayak, yaitu *general public audience* dan *specialized audience*.<sup>47</sup> *General public audience* merupakan khalayak yang sangat luas, heterogen dan anonim secara lengkap. Contoh dari tipe *general public audience* ini adalah pemirsa televisi dan pendengar radio. Sedangkan tipe *specialized audience* dibentuk dari beberapa macam kepentingan bersama antar anggotanya sehingga lebih homogen (paling tidak dalam satu aspek tertentu).

Adapun karakteristik kelompok sosial sendiri dalam kacamata PPP cenderung santai dan mudah meskipun cukup kompleks. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Indarto, yaitu :

“... untuk infrastruktur secara proses komunikasi politik, biasanya dalam kegiatan tatap muka, bersifat santai, mereka berbicara sesuai dengan apa kepentingannya, dengan konteks pembicaraan yang tidak formal...”<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakaria pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.00 WIB

<sup>47</sup>Endang S. Sari, *Audience Research*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 1993), hal.27

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Edy Purwanto,:

“... selama ini dalam menjalankan komunikasi dengan masyarakat, dalam setiap setiap ada kesempatan bertatap muka, tidak harus diforum resmi tetapi juga dilakukan dengan santai...”<sup>49</sup>

Memiliki pengetahuan dan memahami tentang karakter khalayak sangatlah penting. Sebab melalui pemahaman karakter khalayak inilah seorang komunikator mampu memaksimalkan proses komunikasi yang dilakukannya. Acuanannya adalah tidak hanya tersampaikan pesan komunikasi dari komunikator ke khalayak, lebih dari itu ada efek yang muncul setelah terjadinya proses komunikasi tersebut. Efek yang dimaksud disini adalah efek yang positif.

b. Menyusun Pesan Persuasif

Persuasif sendiri merupakan suatu upaya untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau bahkan juga tindakan penerima pesan demi mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara sederhana pesan persuasif dipahami sebagai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan upaya membuat penerima pesan merasa memiliki pilihan dan membuat keputusan yang sama maupun setuju dengan pesan yang disampaikan.

Burgon dan huffner meringkas beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi persuasi sebagai berikut, Pertama, Proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kedua, Proses Komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur paksaan.<sup>50</sup>

Penyusunan pesan persuasive komunikasi politik memang tidaklah mudah. Seorang komunikator harus mampu mengolah kata (retorika) dan mengangkat tema atau isu yang menarik sehingga mampu merubah, mengajak, dan menggerakkan seseorang.

“.. dalam membuat pesan, kita biasanya mengangkat tema-tema yang menarik, dengan mengangkat tema yang menarik, itu akan lebih menggugah perhatian lawan bicara kita ...”ungkap Edy Purwanto.<sup>51</sup>

Hal yang sependapat juga diungkapkan oleh Supriyadi, yaitu:

“ .. ada trick/cara kita dalam membuat orang lain langsung memperhatikan apa yang kita bicarakan, salah satunya adalah dengan memulai pembicaraan dengan isu atau tema yang menarik ..”<sup>52</sup>

Disisi lain, Indarto juga menambahkan,:

“ .. pesan yang kita formulasikan, tidak hanya menarik perhatian saja,, akan tetapi kita juga mencoba untuk membangkitkan semangat

---

<sup>50</sup>Herdiyan Maulana, Gumgum Gumelar, *Psikologi Komunikasi dan Persuasi* (Jakarta : Akademia Permata 2013), hal. 9.

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

yang harapan kami, lawan bicara kami ikut tergerak baik secara fisik maupun jiwanya..”<sup>53</sup>

Hal serupa juga diungkapkan Dian Eka Winartiningsih,:

“...dalam proses berkomunikasi dengan masyarakat, dalam situasi tertentu, misalnya komunikasi dengan sasaran massa yang banyak, pola komunikasinya pasti akan sedikit berbeda, dalam proses ini lebih sering menggunakan kalimat-kalimat penekanan, orasi, dan juga kalimat-kalimat yang dapat memunculkan semangat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.”<sup>54</sup>

Arya Achmad Zakariya juga mengungkapkan bahwa,:

“...agar apa yang menjadi pesan politik sampai kepada masyarakat, khususnya dengan sasaran massa yang banyak, seringkali kita menggunakan kalimat yang menyalakan semangat, seperti berorasi, membuat perhatian mereka tertuju pada kita, pada saat fokus kepada kita maka besar kemungkinan pesan kita sampai kepada mereka...”<sup>55</sup>

“,, dalam rangka menarik minat dan perhatian khalayak, kami kedepankan bukti-bukti kerja kami, mereka akan merasa semakin percaya dengan kami dengan adanya bukti itu, tanpa bukti apa yang

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

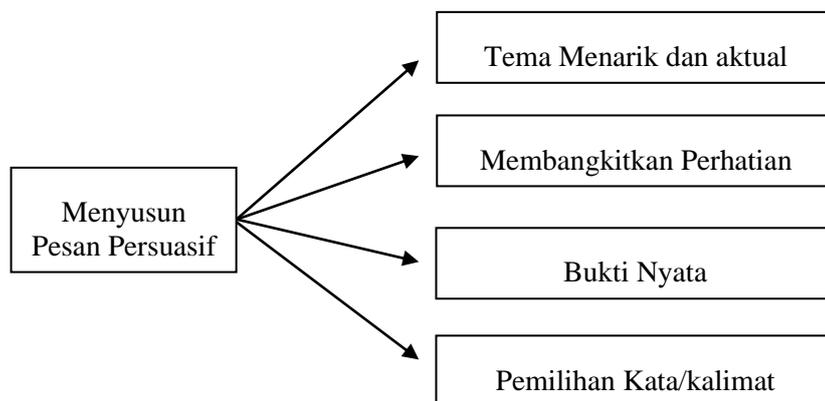
<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Dian Eka Winartiningsih pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakariya pada tanggal 30 November 2020 pukul 09.30 WIB

kita sampaikan hanya akan di anggap angin lalu saja,,” tambah Galih Pamungkas.<sup>56</sup>

“,,masyarakat terkadang acuh untuk memerhatikan ketika pembicara hanya bicara mengenai teori, tetapi pembicara harus juga melampirkan bukti nyata, dengan itu masyarakat baru akan percaya,,” ujar Lilis Ujjanti.<sup>57</sup>

Melihat cara-cara yang dilakukan PPP dalam komunikasi politik kepada infrastruktur politik sebagaimana yang dipaparkan oleh informan maka jika dibuat dalam bentuk skema, PPP dalam menyusun pesan persuasif sebagai berikut:



Jika dicermati dari uraian yang disampaikan informan, PPP dalam menyusun pesan persuasif untuk menghadapi infrastruktur politik sama seperti menghadapi suprastruktur politik dimana mereka

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Galih Pamungkas pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.00 WIB

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujjanti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00 WIB

menggunakan konsep *AIDDA* yang juga dikenal dengan *Adaption process*, yaitu : *attention, interest, desire, decision, dan action*. Artinya, semua dimulai dengan membangkitkan perhatian (*attention*), kemudian menumbuhkan minat dan kepentingan (*interest*), sehingga khalayak memiliki hasrat (*desire*) untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh komunikator, dan akhirnya diambil keputusan (*action*).

Sebagai seorang komunikator, sebuah ucapan atau retorika tidak cukup membuat komunikan tergerak mengikuti pesan yang disampaikan. Untuk menunjang pesan tersebut di ikuti oleh komunikan, komunikator juga harus mempunyai kredibilitas yang baik pula.

“..Selain kita (PPP) berkomunikasi, kita juga harus memberikan contoh karakter yang baik kepada masyarakat...” ungkap Lilis Ujjanti.<sup>58</sup>

Aristoteles menyebut karakter komunikator sebagai *ethos*. *Ethos* terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik dan maksud yang baik (*good sense, good moral character, good will*). Hovland dan Weiss menyebut *ethos* ini *credibility* yang terdiri dari dua unsur : *Expertise* (keahlian) dan *trustworthiness* (dapat di percaya). Seperti halnya nasihat dokter yang kita ikuti, karena dokter memiliki keahlian. Akan tetapi omongan pedagang yang memuji barang jualannya agak sulit

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujjanti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

untuk kita mempercayai karena kita meragukan kejujurannya. Di sini, pedagang tidak memiliki *trustworthiness*. Ethos atau factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang di timbulkannya. Menurut Herbert C. Kelman pengaruh komunikasi kita pada orang lain ada tiga hal yang pertama internalisasi (*internalization*), identifikasi (*identification*), dan ketundukan (*compliance*).<sup>59</sup>

Reaksi terhadap sebuah pesan pada setiap individu akan memiliki beragam tipe, diantaranya: a.) *Selective attention*, dimana masing-masing individu hanya akan memilih program yang menarik minat. b.) *Selective perception*, masing-masing individu akan menafsirkan sendiri pesan-pesan yang diterimanya melalui media massa. c.) *Selective retention*, yaitu individu hanya akan mengingat hal-hal yang ingin ia ingat.<sup>60</sup> Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dian EkaWinartiningsih, ia menyebutkan bahwa:

“,,kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa menerima semua pesan komunikasi kita, masyarakat tentu saja mempunyai persepsi sendiri dari apa yang kita sampaikan, tetapi

---

<sup>59</sup>Herdiyan Maulana, Gungum Gumelar, *Psikologi Komunikasi dan Persuasi* (Jakarta : Akademia Permata 2013), hal. 256.

<sup>60</sup>Suko Widodo, dkk, *Persepsi Ekspektasi Khalayak Terhadap Program Televisi Siaran Lokal*, dalam Laporan Penelitian DIK Rutin Universitas Airlangga, Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga (Oktober 2014), 7.

paling tidak pesan yang kita ingin sampaikan bisa mereka pahami, walaupun tidak semua masyarakat mau untuk mengikuti.”<sup>61</sup>

Banyak hal yang mendorong bagaimana sebuah pesan dapat terbentuk. Dilihat diri komunikator sendiri dan dari khalayak terdapat sebuah penyesuaian dari diri seorang komuniaktor ketika akan menyampaikan suatu pesan pasti memiliki suatu dorongan-dorongan yang mempengaruhi terbentuknya pesan, diantaranya<sup>62</sup> :

1. Keinginan menginformasikan, yaitu suatu keinginan untuk memberi suatu informasi yang ia miliki atau juga ingin khalayak mengetahui apa yang komuniaktor pikirkan.
2. Keinginan menyamakan makna, yaitu suatu keinginan agar khalayak dapat mengerti apa yang komunikator pikirkan.
3. Keinginan mempengaruhi, yaitu keinginan untuk mengajak khalayak setuju dengan apa yang komunikator sampaikan. Dan membuat suatu perubahan dalam pemikiran atau sikap.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pesan dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh kecenderungan internal dan eksternal.

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Dian Eka Winartiningsih pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>62</sup>Ibis Ali, Proses Terbentuknya Pesan dalam Diri Kita, *Kompasiana*, Senin, 30 Januari 2012 (diakses 5 Desember 2020)

### c. Menetapkan Metode

Metode adalah tahapan yang harus dilalui dalam strategi komunikasi politik. Dalam menetapkan metode, tentunya komunikator sudah memahami khalayak yang akan dihadapi. Metode sendiri adalah kunci bagaimana pesan seorang komunikator akan disampaikan kepada komunikan dan menimbulkan efek atas pesan tersebut.

Partai politik yang bersimbolkan ka'bah ini menerapkan metode campuran dalam penyampaian komunikasi politiknya. Hal ini berdasarkan hasil analisa dari calon komunikan yang akan dihadapi sebagaimana diuraikan oleh Indarto, diantaranya yaitu :<sup>63</sup>

‘...untuk berbicara dengan masyarakat selain kita harus mengetahui mereka, dan memposisikan diri menjadi mereka, kita juga harus memilih bahasa dan cara penyampaian yang sekiranya mereka pahami, masyarakat sangat heterogen,, kita tidak bisa hanya menggunakan satu cara penyampaian,,’

Lebih lanjut dia juga menambahkan ,:

“ ... metode atau teknik yang kita gunakan biasanya informatif dan persuasif,, kenapa harus menggunakan metode tersebut? tentu saja sebelumnya kita sudah mengkaji seperti apa lawan bicara kita, bagaimana latarbelakangnya, dan lain lain ... kalau dengan

---

<sup>63</sup>HasilwawancaradenganIndartopadatanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

masyarakat secara umum,, kita akan lebih banyak menyapa terlebih dahulu, karena tidak mudah kita melebur ke masyarakat...”

Hal serupa juga disampaikan oleh Edy Purwanto,:

“,,,berbicara dengan masyarakat tentu bukan sesuatu yang mudah, kita juga harus pandai memilih bahasa dan cara kita menyampaikan kepada mereka, ada yg harus dengan lembut tetapi gamblang, ada yang singkat saja sudah jelas, tetapi ada juga yang sudah lembut, gamblang, jelas, pun harus kita ulangi kembali, inilah proses berkomunikasi mas.., banyak sisi yang bisa kita pelajari,,”<sup>64</sup>

Dia juga menambahkan ,:

“...dalam melaksanakan komunikasi dengan khalayak kami harus mengenali mereka terlebih dahulu, kemudian kami memposisikan diri seperti mereka, misalkan kami berbicara dengan kaum petani, maka kami memposisikan diri kami sebagai petani, berbicara seputar permasalahan yang terjadi di pertanian, dari hal ini nantinya pesan yang kita inginkan akan sampai kepada masyarakat, juga apa yang mejadi keinginan mereka bisa kami serap, untuk selanjutnya kami rumuskan mejadi program aspirasi masyarakat.,,”

Hal serupa juga disampaikan oleh Dian Eka Winartiningsih,:

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

“..tidak jarang ketika kami berdialog dengan masyarakat kami memposisikan diri seolah seperti mereka, dengan begini mereka lebih leluasa berkomunikasi, selain itu pesan yang ingin kami sampaikan lebih mudah sampai kepada mereka.”<sup>65</sup>

Metode komunikasi politik PPP dengan infrastruktur politik ialah dengan cara terlebih dahulu mengenal khalayak dan mulai melontarkan gagasan politik sesuai dengan kepribadian, sikap, dan motif khalayak. Selain itu juga komunikator memulai komunikasinya dengan memulai dari posisi khalayak berada (*start where the audience*) kemudia diubah sedikit demi sedikit diubah kearah tujuan komunikator politik.

Strategi menggunakan metode *informatif*, yaitu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Artinya, menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, dan pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontrofersial atau memberikan informasi atau meuntun khalayak kearah pendapat tertentu.

Jadi, dengan penerangan (*informatif*) berarti, pesan-pesan yang disampaikan, berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Dian Eka Winartiningsih pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian komunikasi diberi kesempatan untuk menilai, menimbang-nimbang, dan mengambil keputusan atas dasar pemikiran yang sehat. Metode ini lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan, dan berita.

Lilis Ujianti juga menambahkan:<sup>66</sup>

“...tujuan penyampaian pesan kita itu langsung menuju point pentingnya, jadi lebih kepada bagaimana lawan bicara kita paham dengan apa yang kita sampaikan, jika mereka belum memahami apa yang kita sampaikan maka kita akan mengulang pesan itu sampai mereka betul-betul paham ..”

Lain halnya dengan pendapat Arya Achmad Zakariya, dia menuturkan bahwasannya metode yang dia gunakan terkadang memerlukan penekanan-penekanan dengan berlandaskan regulasi yang ada.

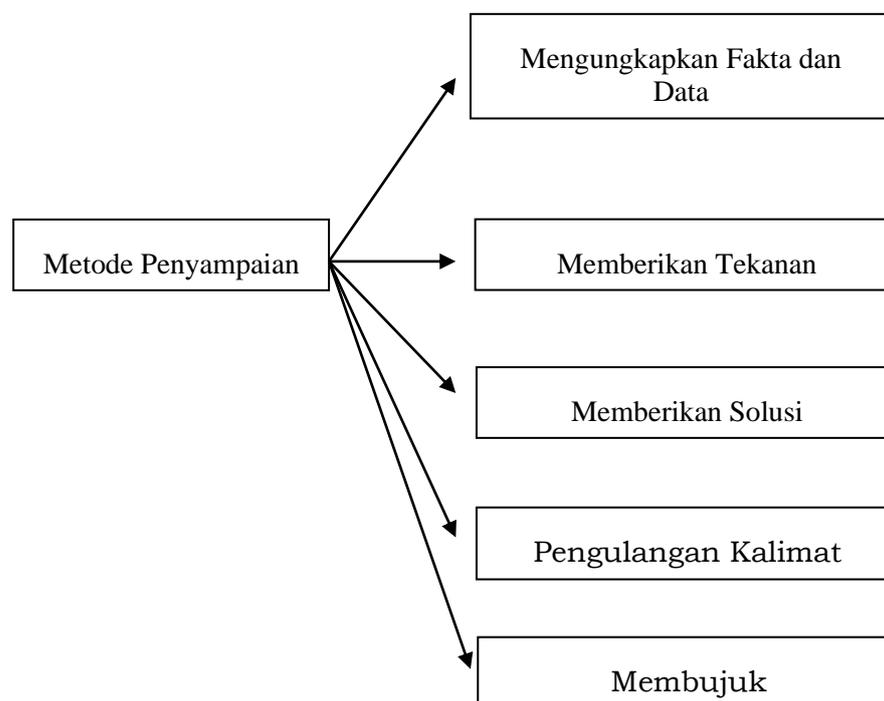
“... Tipikal orang itu berbeda-beda .. ada yang mudah ada yang sulit .. nah yang sulit ini memerlukan ketegasan dalam penyampaian pesan, salah satu caranya dalam penyampaian pesan kita

---

<sup>66</sup>Hasilwawancaradengan Lilis Ujiantipadatanggal 25 November 2020 pukul 10.00

mendasarinya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.. jadi tidak asal berbicara ...”<sup>67</sup>

Mencermati apa yang disampaikan oleh informan, maka PPP dalam menetapkan metode penyampaian komunikasi politik kepada infrastruktur politik dapat digambarkan sebagai berikut:



Jika dilihat dari skema metode penyampaian komunikasi politik diatas, dengan demikian PPP menggunakan beberapa metode yang berbeda-beda sesuai dengan khalayak yang dihadapi dan situasi dan kondisi dimana proses komunikasi itu berlangsung. Adapun dilihat dari segi komunikasi politik, PPP menjalankan metode

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakariya pada tanggal 30 November 2020 pukul 09.30 WIB

komunikasinya dengan infrastruktur politik menggunakan metode *Redudancy, Informatif, Persuasif, Educatif, dan Cuersive*.

Dengan menerapkan berbagai metode diatas, tentu saja pihak PPP mengharapkan ada *feedback* atau timbal balik dari komunikan. Dengan adanya *feedback* tersebut proses komunikasi politik akan hidup. Sebagaimana yang diungkapkan Supriyadi sebagai berikut,:

“...dalam proses komunikasi ke masyarakat, kami berbicara berdasarkan data dan bukti, dari situ kami membuka kesempatan kepada khalayak untuk bertukar pikiran, bahkan menilai hasil kerja, sehingga khalayak merasa di “*wong*” kan dan komunikasi itu akan “*berwarna*”,,”<sup>68</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Galih Pamungkas,:

“,,,,, ketika kita berbicara dengan khalayak banyak, kita juga memperhatikan sejauh mana ketertarikan atau respon mereka dengan topik pembahasan kita, ketertarikan dari khalayak ini menurut kami sangat penting, awalnya dari ketertarikan, dari situ pasti akan tumbuh keyakinan sehingga pesan kita akan mudah sampai,,,”<sup>69</sup>

Hal senada juga di ungkapkan Lilis Ujianti,:

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Galih Pamungkas pada tanggal 10 November 2020 pukul

“,,,berbicara dengan infrastruktur politik pasti kita memperhatikan respon awal mereka, kalo responnya menunjukkan ketertarikan kita lanjutkan pembahasannya, tetapi apabila sebaliknya maka kita harus bisa mencari cara lain,,,”<sup>70</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Indarto,:

“,,,sangat penting menurut saya respon atau ketertarikan masyarakat terhadap apa yang kita bicarakan, jika responnya baik tentu pesannya akan mudah mereka terima, namun jika sebaliknya maka kita harus mencari cara lain agar tujuan kita tercapai,,,”<sup>71</sup>

Dalam proses komunikasi, efek komunikasi merupakan akibat yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, setidaknya efek komunikasi merupakan tahap awal adanya *feedback* (umpan balik) yang merupakan indikator berlanjut tidaknya proses komunikasi tersebut. Disamping efek komunikasi dan *feedback* dapat pula dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat rujukan dan kapasitas yang berada pada komunikan. Efek komunikasi merupakan proses dari aksi-reaksi dari komunikasi.

Menurut Nimmo dan Cangara, unsur-unsur komunikasi politik adalah komunikator politik, pesan politik, saluran atau media

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujianti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

politik, sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik.

Pertama, komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga ataupun berupa kumpulan orang. Dalam pandangan Dan Nimmo, komunikator politik ini memainkan peran-peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat sejumlah gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik.

Karena itu, lanjut Dan Nimmo, sikap terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Baik sebagai sumber individual maupun kolektif, setiap komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

*Kedua*, pesan politik. Pesan adalah muatan atau content komunikasi yang dikemas atau dikonstruksi sebagai informasi/berita/isu dll yang bermuatan politik dalam beragam bentuk,

dan ditransformasikan kepada khalayak dengan menggunakan media, baik media tradisional maupun media massa, serta media jaringan sosial (berbasis internet). Pesan politik merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi politik. Pada hakikatnya, pesan adalah suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencari persamaan makna atau persepsi. Karena pada dasarnya pula, pesan biasanya berisikan tentang gagasan atau ide manusia untuk disampaikan bahkan untuk diperbincangkan dengan manusia lain. Dan ragam pesan bisa berbentuk verbal dan non verbal.

d. Memilah dan memilih media

Media merupakan suatu alat untuk penyaluran pesan dari komunikator kepada komunikan. Disisi lain penggunaan media sangat tergantung pada kebutuhan atau kemampuan khalayak untuk dapat menerima dan mencerna pesan-pesan politik yang disampaikan. Jadi, seleksi media didasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan kepentingan serta lokasi khalayak yang dijadikan sasaran komunikasi politik. Hal ini dikarenakan media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Dalam memilah dan memilih media, PPP dalam berkomunikasi politik tidak mematok media apa yang akan menjadi saluran komunikasi politik, baik dari media cetak, elektronik maupun media sosial. Untuk penyaluran pesan politik, PPP lebih sering

menggunakan komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung ini menurut pandangan PPP lebih efektif dan efisien.

“ .. dalam melaksanakan strategi komunikasi politik, kita seringkali langsung berhadapan dengan komunikasi secara langsung, biasanya dilaksanakan pada saat reses maupun kegiatan pengajian ... terkadang dengan kegiatan-kegiatan tertentu, pihak media yang merapat ke kita ...” ungkap Lilis Ujianti.<sup>72</sup>

“penyampaian pesan kita lebih sering mengadakan tatap muka dan menyampaikan langsung visi dan misi partai, serta diimbangi dengan bukti di lapangan, hal ini dilakukan karena masyarakat sekarang sudah lebih cerdas terlebih dengan maraknya media sosial, sehingga masyarakat akan lebih mendengarkan dengan bukti daripada hanya sekedar ucapan belaka ....” imbuh Indarto.<sup>73</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Edy Purwanto,:

“,, dalam beberapa kesempatan menyampaikan komunikasi politik secara langsung lebih efektif hasilnya daripada menyampaikan lewat media,,,”<sup>74</sup>

Komunikasi interpersonal atau yang biasa disebut dengan komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi antara orang-orang

---

WIB

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Lilis Ujianti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

WIB

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

secara tatap muka. Melalui komunikasi ini setiap orang dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi antar dua orang yang berlangsung secara tatap muka, biasanya bersifat spontan dan informal. Dengan sifatnya yang spontan dan informal antar peserta satu sama lain menerima umpan balik secara maksimal. Di sisi lain, peserta komunikasi berperan secara fleksibel sebagai pengirim dan penerima pesan.

“...keuntungan daripada komunikasi langsung (tatap muka) ini, kita jadi lebih tahu bagaimana reaksi lawan bicara...” ungkap Supriyadi.<sup>75</sup>

“... kalau kita ingin tahu respon dari lawan bicara, ya salah satunya komunikasi tatap muka ..” imbuh Edy Purwanto.<sup>76</sup>

Sebagai cara mengukur keberhasilan dalam berkomunikasi, salah satunya adalah respon dari komunikan. Respon tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang komunikator dalam menentukan langkah selanjutnya dalam menanamkan pesan komunikasi politik. Pernyataan ini diungkapkan oleh Indarto sebagai berikut,:

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Edy Purwanto pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.30

“... kalau mau memperhatikan, sebetulnya saat lawan bicara kita menanggapi (positif) apa yang kita sampaikan, artinya disitulah moment kita untuk menggerakkan lawan bicara kita agar sesuai dengan kepentingan kita ..”<sup>77</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Arya Achmad Zakariya,:

“... selama responnya positif, proses komunikasi politiknya pasti berlanjut, jika negatif ya biasanya berhenti tanpa ada pembahasan lanjutan ..”<sup>78</sup>

Dian juga menambahkan:

“... selama ini, katakanlah dalam lobi politik,, kita lebih sering bertemu langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan ,, misal dalam pembahasan perda miras, sebelum disahkan menjadi perda,, kita melakukan silaturahmi dengan infrastruktur politik melalui agenda reses. Dari agenda reses tersebut kita menampung setiap aspirasi, kemudian kita musyawarahkan ..meskipun kita perwakilan fraksi, namun kita juga perpanjangan tangan dari DPC ...”<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Indarto pada tanggal 8 November 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Arya Achmad Zakariya pada tanggal 30 November 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Dian Eka Winartiningsih pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

Di lain waktu, Lilis Ujianti juga menguatkan pernyataan Dian bahwa anggota fraksi PPP merupakan perpanjangan tangan dari DPC PPP.

“ ... dalam setiap usaha kami dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam, baik itu dengan cara silaturahmi, musyawarah dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan, kita bekerja sesuai dengan prinsip perjuangan partai yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap program kerjanya. Hal ini dikarenakan kita (anggota fraksi) merupakan perpanjangan tangan dari DPC. Dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan berbagai cara yang kami tempuh, besar harapan kami tentunya terjadi perubahan menjadi lebih baik lagi untuk Masyarakat Banjarnegara meskipun secara bertahap dan dengan waktu yang relatif lama ..”<sup>80</sup>

Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik diantaranya yaitu pertama, Pihak-pihak yang berkomunikasi berada pada jarak yang dekat. Kedua, Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim pesan dan menerima pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun nonverbal.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Lilis Ujianti pada tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

Keberhasilan suatu komunikasi merupakan tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam komunikasi interpersonal bebas mengubah topik pembicaraan, kenyataannya komunikasi antar pribadi bisa saja didominasi oleh atasan. Komunikasi antarpersonal sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan kita. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti surat kabar, majalah, e-mail, telepon genggam, yang membuat manusia terasing.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 81.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan suprastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh PPP terhadap suprastruktur politik diantaranya yaitu sebelum melakukan komunikasi politik PPP harus memahami bagaimana khalayak yang akan dihadapi. Suprastruktur politik oleh PPP dikategorikan/dikelompokan sebagai kelompok politik. Sedangkan dalam menyusun pesan persuasif, PPP menggunakan konsep AIDDA.

Selain itu dalam menerapkan metode penyampaian pesannya PPP lebih sering menggunakan kombinasi antara metode *informatif*, *educatif*, dan *cursive*. Sedangkan untuk penggunaan media, PPP dalam menyalurkan komunikasi politiknya tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi *face to face*.

2. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan infrastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara

PPP dalam melakukan strategi komunikasi politiknya kepada infrastruktur politik sebagai khalayak, PPP mengelompokan infrastruktur politik sebagai kelompok sosial. Untuk menyusun pesan persuasifnya kepada kelompok sosial ini PPP menggunakan cara yang sama dengan suprastruktur politik yaitu dengan menggunakan konsep AIDDA.

Adapun metode penyampaian pesannya, PPP juga melakukan kombinasi metode yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan metode yang diterapkan kepada suprastruktur politik, diantaranya yaitu metode

*Redudancy, Informatif, Persuasif, Educatif, dan Cuersive.* Sedangkan untuk penggunaan media komunikasi politiknya, PPP menerapkan hal yang sama seperti kepada suprastruktur politik yaitu tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi interpersonal atau komunikasi *face to face*.

## **B. Saran**

### 1. Pembaca

Penelitian ini masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan dalam berbagai segi. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya penelitian lain di masa yang akan datang terkait Islam dan politik. Peneliti menyadari kedepan pertarungan wacana tentang Islam dan politik akan berlanjut dan semakin marak, karena mengingat eksistensi partai politik Islam untuk pengembangan Islam masih perlu digali. Di sisi lain dalam kancah PEMILU, partai politik juga harus memenuhi ambang batas *parliamentary threshold*.

### 2. Partai Persatuan Pembangunan

Dalam melakukan strategi komunikasi politik, sebaiknya PPP juga menggunakan atau memanfaatkan fungsi media sebagai saluran dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam. Hal ini mengingat kecenderungan masyarakat secara umum dalam mengkonsumsi informasi melalui media, khususnya media digital. Dengan menggunakan media, diharapkan eksistensi partai politik Islam terhadap pengembangan Islam mempunyai rekam jejak yang dapat diketahui oleh masyarakat luas. hal ini sebagaimana harapan PPP yaitu sebagai wujud partai yang menjadi “Rumah Besar Umat Islam” yang seutuhnya dan sepenuhnya.

## **C. Kata Penutup**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala ni'mat dan rida yang diberikan kepada diri penulis, sehingga penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis juga menyadari betul bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat ketidak-sempurnaan (baik sisi penulisan maupun isi). Namun penulis

berharap, semoga hasil sederhana ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Dan untuk dapat lebih menyempurnakan hasil karya tesis ini, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun demi semakin menambah kematangan dan kesempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam; Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Andrianus, Toni, dkk. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa, 2006
- Andrianus, Toni at.al. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa, 2006
- Ardial,. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks, 2010
- Arifin, Anwar. *Strategi Komunikasi*. Bandung: PT Amrico, 1984
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 2000
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Secretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006
- Aziz, A. Ghafar. *Berpolitik Untuk Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000
- Basit, Abdul. *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- . *Wacana Dakwah Kontemporer*. Purwokerto: STAIN Press, 2005
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, Burhan. *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta: Kencana, 2018
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Cangara, H. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007
- . *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- . *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Creswell, Jhon W. *Qualitatvie Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*, 2nd Edition. California: Sage Publications, 2007. E-Book (diakses 30 Mei 2018)
- DeFleur, Melvin L et.al., *Fundamentals of Human Communication*. California: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Depdikbud. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990
- DeVito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Books, 1997
- Effendy, Onong U. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- . *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

- Heryanto, Gun Gun. *Problematika Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018
- Imaroh, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Mawfur. Jakarta: Robbani Press, 1998
- Iriantara, Yosol. *Manajemen Strategis Public Relation*. Jakarta : Ghalia, 2004
- Jasin, Johan. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006
- Kuntowijoyo,. *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018
- , *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993
- Littlejohn, Stephen W and Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*. New Mexico: Wadsworth, Thomson Learning, 2005.
- Littlejohn, Stephen W. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Edisi terjemahan oleh Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Maarif, Syarif. *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999
- Mar'at. *Sikap Manusia : Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Maulana, Herdian dan Gumgum Gumelar. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta : Akademia Permata, 2013
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Edisi terjemahan Jakarta: UI Press, 1992
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Morissan,. *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2013
- Muhtadi, Asep Saiful. *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung : Rosdakarya, 2005
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Nurhasim, Moch. "Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis" dalam Masa Depan Partai Islam Di Indonesia, ed. Moch. Nurhasim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Pawito,. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Penyusun, Tim. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. Ke-3. Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Plano, Jack C dkk,. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994
- Raliby, Osman. Kamus International. Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Salim, Abdul Muin. Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Alqur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sumadiria, Haris. Sosiologi Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1992
- Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press, 2006
- Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. Ke-3. Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Wahyudin, Uud. "Komunikasi Politik dan Budaya Diplomasi" dalam Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktek Komunikasi Kontemporer, ed. Atwar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Warjio,. Gagalnya Partai Politik Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Widjaja,. H.A.W. Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Yarger, Harry R. Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book On Big Strategy. United States: Strategy Studies Institut, 2006

### **REFRENSI LAINNYA**

Ali, Ibis. Proses Terbentuknya Pesan dalam Diri Kita, *Kompasiana*, Senin, 30 Januari 2012 (diakses 5 Desember 2020)

Anggaran Dasar PPP

<http://kpu-banjarnegarakab.go.id> diakses 4 Mei 2018 pukul 10.59 WIB

<http://www.seputarbanjar.com/2018/04/11/kejari-banjarnegara-musnahkan-2-292-botol-miras/> diakses 31 Mei 2018 pukul 14.24 WIB

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1272/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2015.html> diakses 7 Mei 2018 pukul 12.34 WIB

<https://satelitpost.com/beritautama/satpol-pp-banjarnegara-musnahkan-1-465-botol-miras> diakses 31 Mei 2018 pukul 14.46 WIB

Nickols, Fred. *Strategy: Definitions & Meaning*, 2016  
[https://www.nickols.us/strategy\\_definitions.pdf](https://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf)

Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol

Ruli Nasrullah,. “*Riset Khalyak Digital Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial*”, JurnalSosioteknologi, Vol.17 No.2 (Agustus 2018) (diakses 8 Desember 2020)

UU NOMOR 2 TAHUN 2011 tentang Partai Politik

Widodo, Suko at.al., *Persepsi Ekspektasi Khalayak Terhadap Program Televisi Siaran Lokal*, dalam Laporan Penelitian DIK Rutin Universitas Airlangga, Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga, Oktober 2014

[www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id)